

**”UPAYA PEMBERDAYAAN POTENSI PARIWISATA DALAM
RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI KABUPATEN PONOROGO ”**

(Studi di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ENGGAR SETYA W.

NIM : 0410313043



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH
MALANG
2008**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Upaya Pemberdayaan Potensi Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo” (Studi di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Ponorogo)

Disusun oleh : ENGGAR SETYA WARDHANI

NIM : 0410313043

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah

Malang, November 2008

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Susilo Zauhar, M.S
NIP. 130 704 333

Drs. Dwi Sulistyono, MPA
NIP. 131 410 390

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"UPAYA PEMBERDAYAAN POTENSI PARIWISATA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PA) DI KABUPATEN PONOROGO"** (Studi di Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat;

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, MEd. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahap, MA.,Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Prof.Dr. Susilo Zauhar, MS. Selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan pengawasan disela-sela kesibukan beliau.
4. Bapak Drs. Dwi Sulisty, MPA. Selaku Dosen pembimbing pendamping yang telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Gunardi, MSi. Selaku kepala Dinas Pariwisata dan Seni budaya Kabupaten Ponorogo yang telah membantu dalam pengumpulan data skripsi ini.

6. Seluruh staf dan dan karyawan Dinas pariwisata dan Seni budaya Kabupaten Ponorogo atas keramahan dan kebaikannya selama peneliti melakukan penelitian
7. Terima kasih kepada Kedua Orang Tua penulis yang telah mendukung dalam materi dan non-materi serta dengan tiada henti-hentinya mengiringi dengan Do'a dan harapan bagi keberhasilan penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Malang,

2008

Penulis

RINGKASAN

Enggar Setya W. 2007, "Upaya Pemberdayaan Potensi Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo" (Studi di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Ponorogo). Prof.Dr. Susilo Zauhar, MPA; Drs. Dwi Sulisty, MPA.

Pariwisata adalah salah satu industri yang menjadi andalan Indonesia. Dalam memperoleh devisa negara dan juga andalan daerah untuk menambah pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya untuk membangun sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam arti luas mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menjadi salah satu penghasil devisa, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras pemberlakuan otonomi daerah yang sudah berjalan yang mana pemerintah daerah diberi kesempatan luas mengelola rumah tangganya sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten ponorogo dalam pemberdayaan potensi wisata dan potensi seni budaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah kondisi potensi pariwisata kabupaten ponorogo,pendayagunaan potensi pariwisata kabupaten ponorogo,upaya pemberdayaan potensi pariwisata kabupaten ponorogo dalam meningkatkan PAD, faktor pendukung dan penghambat upaya pemberdayaan potensi pariwisata dalam peningkatan PAD Kabupaten Ponorogo.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo mempunyai berbagai macam potensi wisata dan potensi seni budaya dimana dari masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri Pemberdayaan Obyek dan Daya Tarik Wisata.Pengembangan sarana dan Prasarana wisata. Mengadakan diklat teknis Pariwisata.Pengembangan Kesenian : Upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk wadah kesenian dan kebudayaan, mengadakan festival, upacara adat dan mengemas produk-produk kesenian dan kebudayaan menjadi lebih menarik.Pengembangan pemasaran dan Promosi wisata. Membuat leaflet, Bookflet, yang disebarakan keberbagai media, mengadakan promosi.Namun demikian sarana pokok dan pendukung potensi wisata potensi seni budaya ini secara umum masih kurang memadai. Dan upaya pemberdayaan sektor wisata ini belum dilakukan secara optimal, karena masih terdapat permasalahan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.Pada akhir pembahasan disimpulkan bahwa kabupaten Ponorogo mempunyai potensi yang cukup, namun belum dikembangkan secara optimal karena keterbatasan Dana untuk upaya pemberdayaan sehingga kontribusi yang diberikan dari sektor wisata seni budaya terhadap PAD ini juga masih kecil. Selanjutnya penulis memberikan saran agar kiranya di perlukan menyusun suatu strategi pemberdayaan sektor wisata seni budaya yang terkoordinasi dengan sektor lain yang dapat saling mendukung.

SUMMARY

Enggar Setya W. 2007, **"Empowerment Efforts of Tourism Potential Related in to increase local income (PAD) in the regency of Ponorogo"** (Study at Tourism, art, and culture office in the regency of Ponorogo). Supervisor: Prof.Dr. Susilo Zuhari,MPA ; Co. Supervisor: Drs. Dwi Sulisty, MPA.

Tourism is one of potential industry in Indonesia. Its also potential ones to add local income. The empowerment in tourism sector as one of source income aimed at expansion of tourism as pre-eminent sector in meaning of wide can push investment growth, becomes one of foreign exchange producer, increases area earnings, powered of economics of public and increases public prosperity. This application met the regional autonomy that conducted in local government by opportunity of wide manages their own household.

This research objectives are to explore and discribe the effort of Ponorogo government in tourism sector. This research are applies descriptive research with qualitative approach. This research focused in contribution of tourism sector to local income in the regency of Ponorogo, potency of tourism, expansion effort of wisata culture art, factor support and expansion effort resistor of sector tourism, art, and culture in the regency of Ponorogo.

The results showed that Ponorogo has various tourism, art and cultural potencies where each potency has its own attractiveness. The object and tourism attractiveness empowerment. Tourism infrastructure development. Conducting education and training about tourism technique. Art development: the conduced efforts is by building art and cultural institution, conducting festival, custom ceremonies and package the art and cultural products become more interesting. The tourism marketing and promotion. Making leaflet, booklet, that is spread in various media, conducting promotion. But the main mediums and supporting potencies in general is lack. And effort for tourism empowerment is not done optimally yet, because many problems and obstacles in its implementation. At the final discussion, it is concluded that Ponorogo Regency has enough potencies, but do not be developed yet optimally because of limited funds for the empowerment so the given contribution for the tourism, art, and cultural sectors toward local revenue still small. Then the author sugggets to measure empowerment efforts of tourism, art, and cultural empowerment that is coordinated with other sectors that mutually supportive.

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
ABSTRAKSI..... i
SUMMARY..... ii
KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI..... v
DAFTAR TABEL..... viii
DAFTAR LAMPIRAN..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
 B. Perumusan Masalah 7
 C. Tujuan Penelitian 7
 D. Kontribusi Penelitian 8
 E. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi dan Pengertian Pemberdayaan
 1. Definisi Pemberdayaan 11
 2. Konsep dan Tujuan Pemberdayaan 13
 3. Pendekatan Pemberdayaan 14
 B. Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah 15
 1. Pengertian Pemerintahan Daerah 15
 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Daerah 19
 3. Keuangan Daerah 22
 4. Sumber Pendapatan dan Pengelolaannya 25
 C. Pemberdayaan Wisata, Seni dan Budaya 29
 1. Pengertian Wisata 30
 2. Jenis-jenis Wisata 34
 3. Pengertian Seni Budaya Daerah 36



D. Kontribusi Wisata Dan Seni Budaya terhadap Pendapatan Asli Daerah ..	42
1. Pendapatan Asli Daerah	43
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	43
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah Dari sektor Wisata dan Seni Budaya.....	44
c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	46
E. Hambatan dalam pemberdayaan Wisata, Seni dan Budaya.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	51
B. Fokus Penelitian	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian	54
D. Jenis dan Sumber data	54
E. Teknik pengumpulan data	55
F. Instrumen Penelitian	57
G. Analisa Data	58

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Kabupaten Ponorogo	60
1. Keadaan Geografis	61
2. Pemerintahan	64
3. Penduduk	66
4. Pendidikan	68
5. Sosial	69
B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo	70
1. Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya	70
2. Tujuan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya	71
3. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya	71
4. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya.....	72
C. Data Fokus Penelitian	86
1. Kondisi potensi Pariwisata Ponorogo.....	86

a. Potensi obyek dan daya tarik wisata.....	86
b. Potensi obyek wisata dan seni budaya	91
c. Obyek dan daya tarik wisata budaya.....	95
2. Pendayagunaan Potensi Wisata di Kabupaten Ponorogo dilihat dari Pendapatan Asli Daerah.....	103
a. Pendapatan Daerah dari sektor wisata Seni Budaya.....	103
b. Kontribusi Sektor Wisata dan Seni Budaya terhadap PAD.....	106
D. Upaya Pemberdayaan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Ponorogo.....	107
1) Peningkatan Pemasaran dan Promosi wisata Seni budaya	110
2) Upaya Pemberdayaan Obyek dan Daya Tarik Wisata	111
3) Pengembangan Sarana dan Prasarana pariwisata.....	113
4) Pengembangan kemampuan Pegawai Dinas pariwisata dan Seni Budaya sebagai pelaksana pemberdayaan potensi pariwisata	124
5) Pengembangan kesenian dan kebudayaan	126
E. Faktor Pendukung dan Penghambat pemberdayaan pariwisata Kabupaten Ponorogo	131
1) Faktor Pendukung Pemberdayaan pariwisata Kabupaten Ponorogo.....	131
2) Faktor Penghambat Pemberdayaan pariwisata Kabupaten Ponorogo	132
F. Analisa Data	
1) Kontribusi Sektor Wisata dan Seni Budaya terhadap PAD kabupaten Ponorogo.....	134
2) Upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upaya pemberdayaan potensi pariwisata	136
3) Faktor Pendukung dan Penghambat pemberdayaan potensi pariwisata Kabupaten Ponorogo.....	144
BAB V PENUTUP	
1) Kesimpulan	147
2) Saran	149

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam perekonomian sebagai sumber ekonomi negara dan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Sektor pariwisata meliputi beberapa bidang usaha seperti: hotel dan restaurant, biro perjalanan wisata, kawasan wisata. Pariwisata merupakan sektor yang melibatkan sektor-sektor lain, sehingga koordinasi sangat penting.

Dua perubahan penting akan sangat mempengaruhi perkembangan sektor pariwisata, yaitu globalisasi dan lokalisasi atau desentralisasi dan otonomi daerah. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian GATT/WTO Putaran Uruguay pada tahun 1994 memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Komitmen sektor pariwisata Indonesia dalam rangka globalisasi telah diberikan dalam kerangka AFTA tahun 2002 (*Asean Framework Agreement on Services*), dan GATS/WTO tahun 2020.

Negara-negara maju dan berkembang pada umumnya pariwisata dikelola oleh kalangan swasta yang memiliki modal usaha yang besar yang berasal dari luar daerah dan bahkan luar negeri. Sehingga masyarakat lokal yang berada di suatu daerah destinasi pariwisata tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata sering kali menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal bukan termasuk stakeholders

dari pariwisata dan merupakan kelompok yang termarginalisasi dari kesempatan bisnis dalam bidang pariwisata.

Indonesia sendiri, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pariwisata sangat berbeda dan ini tergantung dari jenis potensi, pengalaman, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh individu atau masyarakat lokal tersebut. Pariwisata adalah salah satu industri yang menjadi andalan Indonesia dalam memperoleh devisa negara dan juga andalan daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor Pariwisata di Indonesia mendapat prioritas dalam pembangunan. Pemerintah menghendaki agar pembangunan kepariwisataan memperoleh perhatian khusus, agar bisa meningkatkan pendapatan negara serta daerah. Meskipun sektor pariwisata sempat terpuruk beberapa waktu lalu akibat krisis multidimensi yang dialami bangsa ini, sektor pariwisata terus bergegas bangun dan kembali mampu menjadi penyumbang devisa tertinggi.

Upaya untuk membangun sektor Wisata seni budaya sebagai salah satu sumber pendapatan diarahkan pada upaya pemberdayaan wisata seni budaya sebagai sektor unggulan dalam arti luas mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menjadi salah satu penghasil devisa, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan pemberlakuan otonomi daerah yang sudah berjalan yang mana pemerintah daerah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Sumber daya alam yang dimiliki daerah dimanfaatkan secara optimal oleh daerah sendiri karena sebagian besar dari keuntungan akan dinikmati oleh daerah. Pemerintah

daerah dituntut untuk lebih proaktif dalam menangani sektor pariwisata ini karena sector pariwisata merupakan penyumbang pendapatan yang menjanjikan.

Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki kelebihan dan daya tarik tersendiri. Hal ini tidak dapat dipungkiri dengan melihat letak geografis kepulauan Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, adat dan budaya. Begitu juga halnya dengan kabupaten Ponorogo. Sebagai kota kecil yang berada di Jawa Timur mempunyai suatu Wisata seni budaya yang perlu digali dan perlu dikembangkan.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan pemasukan adalah kontribusi sektor Wisata seni budaya dengan harapan dapat dikelola dan dikembangkan sebagai sumber pemasukan keuangan daerah.

Pemberdayaan sektor Wisata dan Seni Budaya pada hakekatnya adalah upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah yang berupa obyek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain kekayaan alam yang indah, keragamann flora dan fauna, keanekaragaman bentuk kesenian atau tradisi serta peninggalan sejarah dan meningkatkan kegiatan di bidang Wisata dan Seni Budaya.

Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Potensi-potensi wisata yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dipengaruhi oleh letak geografis dari kawasan wisata tersebut. Termasuk didalamnya potensi wisata di daerah Kabupaten Ponorogo juga

mempunyai ciri-ciri sendiri untuk dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk keperluan perencanaan dan pengembangan. Dari berbagai potensi wisata tersebut dapat ditentukan kebijakan apa yang dapat mendukung sektor wisata. Serta dari potensi tersebut dapat memiliki kontribusi dalam realisasi Total Pendapatan Asli Daerah kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, dalam 4 (Empat) tahun terakhir target dan realisasi Total Pendapatan Asli Daerah kabupaten Ponorogo mulai tahun 2003 sebesar Rp 23.038.061.000,- dan pencapaian realisasi sebesar Rp 23.873.498.059.000,- atau 103,62%. Kemudian tahun 2004 sebesar Rp 24.199.937.145,- dan raelisasi sebesar Rp 24.579.703.082,27 atau sebesar 101,57 %. Untuk tahun 2005 sebesar Rp 25.921.195.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 28.279.449.793,43 atau 109.10 % dan tahun 2006 sebesar Rp 30.242.636.048,00 yang terealisasi Rp 35.398.902.087,39 atau sebesar 117.05 %. Dan total pendapan selama empat Tahun terkhir sebesar 108.44 %. Dalam jumlah PAD setiap tahunnya mencapai melebihi target yang ditetapkan.

Dalam sektor wisata seni budaya Kabupaten Ponorogo belum mencapai target yang diinginkan. Pada tahun 2003 jumlah pendapatan dari sektor wisata seni dan budaya sebesar Rp 664.250.173,- dan teralisasi sebesar Rp 655.000.000,- atau 68,6%. Tahun 2004 target yang ditentukan sebesar Rp 870.181.128,00 dan teralisasi sebesar Rp 755.800.000,- atau 86,8%. Kemudian pada tahun 2005 target yang ditentukan sebesar Rp 1.016.845.884,- dan terealisasi sebesar Rp

845.175.000,- atau sebesar 96,1%. Tahun 2006 sebesar RP 1.445.495.431,- dan terealisasi sebesar Rp 907.592.000,- atau sebesar 62,7%.

Dari data sementara diatas, terlihat bahwa pengelolaan potensi pariwisata belum berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dengan belum tercapainya target yang diinginkan. Pada tahun 2003 yang terealisasi sebesar 68,6%, pada tahun 2004 yang teralisasi 86,8%. Kemudian pada tahun 2005 terealisasi 96,1%. Dan pada tahun 2006 terealisasi sebesar 62,7%. Hal ini dikarenakan beberapa hambatan dalam pengelolaan potensi pariwisata, antara lain :

1. Kurang terpadunya pengembangan pariwisata dengan pengembangan sektor lain yang mendukung.
2. Keterbatasan Dana yang tersedia sehingga pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dilaksanakan secara optimal, dan hal inilah yang menjadi permasalahan yang utama.
3. Masih kurangnya peran serta dunia usaha wisata dan seni budaya perlu ditingkatkan mengingat citra positif produk wisata sangat ditentukan oleh para pelaku usaha pariwisata.
4. Informasi tentang kepariwisataan yang disediakan masih terbatas dan banyak perlu dimutakhirkan datanya dan khususnya informasi tentang wisata dan seni budaya sangat terbatas.
5. Masih kurangnya barang-barang cinderamata dan masih perlu dikembangkan, baik yang menyangkut cinderamata yang mudah dibawa

yang mencerminkan ciri khas daerah maupun produksi-produksi yang dengan kemasan yang menarik dan harga yang terjangkau.

6. Mutu produksi dan pelayanan wisata yang ada perlu ditingkatkan terutama akomodasi, penyajian obyek dan daya tarik wisata yang kurang direncanakan sehingga memberi kesan kurang menarik.
7. Fasilitas jalan untuk menuju obyek wisata khususnya ngebel sangat sempit dan berkelok-kelok padahal obyek wisata ini menjadi tujuan utama wisata hal ini yang menjadi kendala-kendala pengembangan sektor wisata dan menyebabkan penghambatnya pengembangan wisata..
8. Persaingan untuk mendapat pangsa pasar wisatawan mancanegara semakin tajam (Sujana, 2002).

Upaya pemberdayaan sektor Wisata dan Seni budaya di Kabupaten Ponorogo juga harus dapat memberi sumbangan dalam menunjang pendapatan Asli Daerah. Pemusatan ini berarti bahwa pengembangan Wisata dan Seni Budaya tersebut harus dapat memberikan kontribusi yang besar terutama dalam bentuk pembiayaan pembangunan daerah yang dimasukkan kedalam pendapatan Asli Daerah karena salah satu pembiayaan dalam negara melaksanakan pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka besar dan kecilnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan fenomena diatas, dapat dilihat betapa pentingnya sektor pemberdayaan Wisata Seni Budaya bagi pembangunan khususnya Kabupaten ponorogo, Sehingga penulis berminat mengambil penelitian tentang: **"UPAYA PEMBERDAYAAN POTENSI PARIWISATA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN PONOROGO"** (Studi di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Ponorogo)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah Penelitian ini adalah:

1. Kondisi potensi pariwisata di Kabupaten Ponorogo saat ini ?
2. Potensi pariwisata di Kabupaten Ponorogo sudah didayagunakan ?
3. Upaya pemberdayaan potensi pariwisata di Kabupaten Ponorogo dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ?
4. Faktor pendukung dan penghambat upaya pemberdayaan potensi pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan Asli daerah di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi potensi pariwisata di Kabupaten Ponorogo saat ini ?
2. Untuk mengetahui apakah semua potensi di Kabupaten Ponorogo sudah didayagunakan
3. Untuk mengetahui upaya pemberdayaan potensi pariwisata di Kabupaten Ponorogo dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya pengembangan Wisata Seni Budaya di Kabupaten Ponorogo?

D. Kontribusi Penelitian

- a. Implikasi Teoritis
 1. Sebagai bahan studi bagi penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan potensi pariwisata daerah.
 2. Sebagai bahan informasi dalam rangka menambah wawasan tentang upaya pemberdayaan potensi pariwisata daerah.
- b. Implikasi Praktis
 1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya Dinas Pariwisata dan Seni budaya Kabupaten Ponorogo dalam upayanya memberdayakan potensi pariwisata daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Sebagai bahan masukan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya Dinas Pariwisata dan Seni budaya Kabupaten Ponorogo dalam proses pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan potensi Pariwisata dan Seni Budaya di Kabupaten Ponorogo.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi negara dan juga sebagai bahan pembanding atau lanjutan atas penelitian yang serupa.

E. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang penjelasan masing-masing sub bab pendahuluan yang terdiri dari: *Pertama*, latar belakang yang mengemukakan permasalahan berkaitan dengan judul skripsi dan diungkapkan pula pertimbangan apa sehingga perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut. *Kedua*, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan di bahas dalam penelitian. *Ketiga*, tujuan penelitian yang berisikan hal-hal yang hendak dicari atau dikemukakan nantinya. *Keempat* adalah kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai bentuk pernyataan tentang hasil penelitian secara spesifik dan *kelima* adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dan bab-bab dari penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang selanjutnya diungkapkan pada studi pustaka untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul itu, teori-teori yang dapat mendukung penelitian tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum yang meliputi lokasi dan situs penelitian. Penyampaian data yang diperoleh selama mengadakan riset dan menggambarkan sejumlah instrumen penelitian dilakukan serta isi bab yang akan dijadikan acuan pembuatan kesimpulan dan saran pada bab berikutnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran kesimpulan ditarik dari bab-bab selanjutnya dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab selanjutnya, sedangkan saran dikemukakan berdasarkan ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan dilapangan. Kemudian saran ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dikemudian hari.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi dan Pengertian Pemberdayaan

1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan proses yang memerlukan perencanaan menyeluruh, pemikiran mendalam tentang mekanisme pemantauan dan peningkatan secara terus menerus. (Sedarmayanti, 1999:81). Pemberdayaan *adalah* upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Sumodiningrat, 1996).

Definisi pemberdayaan menurut peraturan perundang-undangan (2007:7) tentang usaha kecil dan waralaba pada bab I ketentuan umum pasal I ayat 3:

“Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.

Pemberdayaan yang dikenal dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat, terutama Eropa. Konsep tentang pemberdayaan telah luas diterima dan digunakan, mungkin dengan pengertian yang berbeda satu sama lain.

Istilah pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:214) berasal dari kata berdaya, yang berarti berkekuatan, berkemampuan dan bertenaga untuk melakukan sesuatu. Selain itu Kartasasmita (1996:144) mengemukakan pendapatnya tentang pemberdayaan yaitu:

”Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Selain itu keberdayaan masyarakat adalah unsure dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber ketahanan nasional. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.”

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kartasasmita (1996:45) bahwasannya:

”Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong dan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya, bukan hanya meliputi penguatan individu dan masyarakat tetapi juga para pranatanya, melalui pengamatan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dalam upaya pemberdayaan. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga social dan pengintegrasianya dalam

kegiatan-kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai peluang yang akan membuat masyarakat akan semakin berdaya.”

2. Konsep dan Tujuan Pemberdayaan

Menurut Pranarka dalam Sedarmayanti (1999:79) konsep pemberdayaan ini mempunyai dua kecenderungan, yaitu:

”*Pertama*, pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. *Kedua*, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.”

Arti dari konsep diatas pemberdayaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk secara bebas memilih berbagai alternatif sesuai dengan tingkat kesadaran, kemampuan dan keinginan mereka, maupun dari kegagalan terutama dalam hal memberi respon terhadap perubahan.

Tujuan pemberdayaan adalah membangun daya dengan mendorong dan memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi atau daya yang memiliki serta adanya upaya untuk mengembangkan kearah yang lebih baik. Secara umum pemberdayaan dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk memampukan dan mengembangkan potensi atau daya yang ada pada diri sendiri atau orang lain (kelompoknya) untuk dapat berbuat lebih baik.

3. Pendekatan Pemberdayaan

Cook dan Macaulary (1997) menawarkan pendekatan pemberdayaan yang dapat dilihat sebagai akronim “ACTORS” yang terdiri atas:

- a. *Authority*, yaitu memberi wewenang kepada kelompok masyarakat untuk merubah pendiriannya atau semangat (etos kerja) menjadi suatu milik sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dan keinginan mereka untuk perubahan yang lebih baik.
- b. *Confidence and competence*, yaitu memberikan rasa percaya diri dan melihat kemampuan mereka untuk merubah keadaan mereka.
- c. *Trust*, yaitu menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka bisa.
- d. *Opportunity*, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya, sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri.
- e. *Responsibility*, yaitu dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan, sehingga dengan penuh tanggung jawab untuk perubahan menjadi lebih baik.
- f. *Support*, yaitu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam kegiatan ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, budaya, sosial dan sebagainya yang dilakukan secara simultan tanpa dominasi salah satu faktor.

Menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1995 ada dua pendekatan dalam pemberdayaan usaha kecil, yaitu penciptaan iklim usaha dan melalui pembinaan dan pengembangan. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim usaha yang ditumbuhkan pemerintah melalui penetapan perundang-undang dan kebijaksanaan yang meliputi aspek persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha, dan perlindungan.

B. Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan Daerah Otonom melalui Desentralisasi, pada hakikatnya adalah menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan. Desentralisasi dapat menjamin integrasi bangsa. Otonomi Daerah, sebagai salah satu bentuk “Desentralisasi” pemerintahan, pada hakikatnya, ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih adil dan makmur, pemberian, pelimpahan dan penyerahan tugas tugas kepada daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, terdapat keseragaman bentuk Pemerintah Daerah di Indonesia baik untuk daerah Propinsi maupun untuk Daerah Kabupaten dan Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah Daerah (*local authority*) sebagai organ pelaksana pemerintahan di daerah selalu tepat asas dengan mencakup DPRD (*council*) dan Kepala daerah (*mayor*). Akan tetapi, pada Undang-Undang tersebut istilah pemerintah daerah hanya diperuntukan bagi kepala daerah beserta perangkat daerah dan tidak mencakup DPRD yang disebut sebagai badan legislatif daerah. Kondisi ini disebut sebagai tidak taat asas, karena hanya DPR yang mempunyai fungsi legislatif dan menjadi bagian dari badan legislatif bersama presiden dalam tata hukum kita.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah terdiri (a) Daerah Propinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah Propinsi dan DPRD Propinsi; dan (b) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Daerah Propinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari daerah kabupaten dan kota sehingga tidak ada hubungan hierarki. Daerah kabupaten dan daerah kota mencerminkan pelaksanaan asas Desentralisasi secara bulat dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan tanggung jawab. Oleh karena pelaksanaan asa Dekonsentrasi hanya diletakkan didaerah propinsi sebagai wilayah administrasi, kini di daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah

administrasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemandirian daerah otonom. Bahkan berbagai kawasan khusus yang selama ini dibina oleh pemerintah pusat atau pihak lain sebagai pencerminan asas delegasi atau desentralisasi fungsional seperti badan otorita, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan pariwisata dan semacamnya kini berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.

Meskipun berada pada jenjang yang sama, perbedaan status daerah kabupaten dan kota dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada kondisi masyarakat atau kawasan setempat. Daerah kabupaten dimaksudkan bagi masyarakat atau kawasan pedesaan (*rural area*). Daerah kota dimaksudkan bagi masyarakat atau kawasan perkotaan (*urban area*). Dengan demikian, diharapkan terjadi perbedaan ragam pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Namun pada praktiknya, sulit untuk membedakan berbagai jenis pelayanan yang menunjukkan karakter perkotaan atau pedesaan karena hampir setiap kabupaten dan kota mempunyai jenis pelayanan dan struktur internal yang mirip satu sama lain. Bahkan Pemerintah Kabupaten yang seyogyanya bercorak pedesaan tampak lebih berorientasi pada pelayanan perkotaan dan berusaha terus menciptakan kota-kota baru. Kondisi ini tampaknya lebih dipengaruhi oleh tradisi keseragaman yang telah ditekankan begitu lama oleh pemerintah pusat untuk mencapai nilai efisiensi penyelenggaraan pembangunan.

Pembentukan daerah otonom dilakukan berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya. Pembentukan daerah, nama,

batas, dan ibu kota ditetapkan dengan Undang-undang. Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibu kota daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain. Selain itu, daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah. Kriteria penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah, sementara pelaksanaannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Kini setiap Daerah Otonom memiliki hak dan kewajiban masing-masing serta memiliki urusan yang dapat dibagi dua, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan tersebut antara lain meliputi pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, Wisata seni budaya yang secara nyata ada dan benar-benar merupakan potensi daerah. Hal ini berarti setiap daerah bisa berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Urusan wajib merupakan urusan yang harus dijalankan oleh daerah otonom sebagai bentuk kewajibannya untuk memberikan pelayanan dasar dan menciptakan standarisasi pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Dalam menjalankan urusan otonomi, daerah memiliki hak dan kewajiban. Hak Daerah Otonom meliputi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih pimpinan daerah; mengelola aparatur daerah; mengelola kekayaan daerah; memungut pajak dan retribusi daerah; mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang

berada didaerah; mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hal lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, kewajiban Daerah Otonom meliputi: melindungi masyarakat; menjaga persatuan, kesatuan, dan krukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mewujudkan keadilan dan pemerataan; meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; mengembangkan sistem jaminan sosial; menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; mengembangkan sumber daya produkif daerah; melestarikan lingkungan hidup; mengelola administrasi kependudukan; melestarikan nilai sosial budaya; membentuk dan menerapkan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan kewajiban lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
2. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Politik luar negeri;
 - b. Pertahanan;
 - c. Keamanan;
 - d. Yustisi;
 - e. Moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. Agama.
4. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusannya, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
5. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan, Pemerintah daerah dapat:
 - a) menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
 - b) melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
 - c) menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

- a) “kriteria eksternalitas” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan urusan pemerintahan.
 - b) “kriteria akuntabilitas” adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
 - c) “kriteria efisiensi” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
 - d) Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
7. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria tertentu terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
8. “urusan wajib” adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara antara lain:
- a. perlindungan hak konstitusional;
 - b. perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI; dan

c. pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

9. “Urusan pilihan” adalah urusan yang secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

3. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan (Yoeti, 1997), bahwa yang di maksud dengan:

- a. Semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah.
- b. Semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keuangan daerah merupakan rangkaian dari keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan yang berupa hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan daerah, dan berada dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia dapat ditelusuri dari skema keuangan pemerintah daerah yang tertuang secara resmi dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, dan kini peraturan tersebut telah disempurnakan sehingga penerimaan pemerintah daerah dapat disimak dalam Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Hubungan Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah memiliki hubungan yang erat dengan keuangan daerah. Keuangan Daerah mencakup hak-hak daerah untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas

penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Pemberian sumber-sumber keuangan ini berarti daerah memiliki konsekuensi lain, yaitu selain menerima sumber keuangan, daerah juga harus berupaya untuk mengelola sumber keuangan tersebut. Pengelolaan sumber keuangan ini dilakukan salah satunya dengan melakukan pemungutan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah itu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kuangan daerah merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh (Jimung, 2005; 90-91)

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, faktor keuangan yang baik sangat berkaitan dengan sumber pendapatan, jumlah yang cukup dan pengelolaan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan ini penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan uang atau biaya. Realitas menunjukkan bahwa semakin besar jumlah uang yang tersedia, semakin banyak pula kemungkinan pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolanya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, keberhasilan suatu daerah sangat ditentukan oleh kondisi kemampuan keuangan daerah. Hal ini dikemukakan oleh (Kaho, 2002, h.252) berikut :

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan daerah, karena kemampuan keuangan daerah ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Hal ini mudah dipahami, karena adalah mustahil bagi daerah-daerah untuk dapat menjalankan berbagai tugas-tugas dan pekerjaannya dengan efisien dan

efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya tanpa tersedianya dana untuk itu.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat betapa pentingnya keuangan daerah bagi pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memerlukan kondisi keuangan daerah yang baik untuk melakukan aktivitasnya dengan baik.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat betapa pentingnya keuangan daerah bagi pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memerlukan kondisi keuangan daerah yang baik untuk melakukan aktivitasnya dengan baik. Sedangkan dalam perencanaan sasaran atau hasil yang harus dicapai oleh pemerintah daerah (Dinas Pariwisata dan Seni Budaya) tentang penerimaan PAD dari sektor wisata kabupaten Ponorogo telah ditetapkan oleh Daerah.

Seperti yang telah diketahui di tahun 2003 kenaikan Pendapatan Asli daerah dari sektor pariwisata dan seni budaya sebesar 3.62 %, kemudian tahun 2004 sebesar 1.57 %, tahun 2005 sebesar 9.10 % dan tahun 2006 sebesar 17.05 %. Dan total pendapan selama empat Tahun terakhir sebesar 8.44 %, maka untuk tahun berikutnya direncanakan terus meningkat lebih dari 10 %.

4. Sumber Pendapatan Daerah dan Pengelolaannya

Sumber-sumber Pendapatan daerah terdiri atas :

a. *Pendapatan Asli Daerah*, yaitu :

- 1) Hasil Pajak Daerah; Salah satu sumber dari pendapatan daerah adalah dari pajak daerah. Definisi pajak seperti yang diungkapkan oleh Guritno Mangkoesobroto (1993:181): **Pajak** adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah pungutan tersebut berdasarkan

undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Selanjutnya Kesit Bambang Prakosa (2003:1, 88) menjelaskan bahwa: **Pajak Daerah** adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

- 2) Hasil Retribusi Daerah; menurut Kesit Bambang Prakosa (2003) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah; Menurut Ermaya Suradinata (1998:86) Perusahaan Daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerahnya untuk menambah penerimaan daerah. Dengan demikian, masing-masing daerah dapat mengembangkan potensi perekonomian daerah melalui badan usaha yang dikelolanya. Adapun ciri pokok perusahaan daerah adalah adanya kesatuan produksi (regional) dalam arti luas termasuk memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.
- 4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;

- b. *Dana Perimbangan;*
- c. *Pinjaman daerah; dan*
- d. *Lain-lain pendapatan daerah yang sah*

Dalam pengelolaannya, sumber pendapatan daerah harus mengacu pada kriteria-kriteria berikut :

1. *Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran*

Merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Sebagai instrument evaluasi pencapaian kemampuan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

2. *Disiplin Anggaran*

APBD harus disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggung-jawabkan.

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Belanja yang aparatur dengan belanja pelayanan publik harus dipisahkan secara jelas agar tidak terjadi pencampur-adukan kedua sifat anggaran, yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu dalam rangka

efisiensi dan efektivitas serta penilaian kemampuan anggaran, kesalahan pencantuman biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah yang selama ini dianggarkan dalam belanja belanja pelayanan publik, perlu diluruskan dengan cara mengalihkan penganggarnya ke dalam anggaran belanja aparatur. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

3. *Keadilan Anggaran*

Pendapatan Daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran*

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran. Hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

C. Pemberdayaan Wisata, Seni dan Budaya

Istilah pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:214) berasal dari kata berdaya, yang berarti berkekuatan, berkemampuan dan bertenaga untuk melakukan sesuatu. Selain itu Kartasmita (1996:144) mengemukakan pendapatnya tentang pemberdayaan yaitu:

”Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Selain itu keberdayaan masyarakat adalah unsure dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber ketahanan nasional. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.”

Sedangkan pengertian pemberdayaan wisata menurut Musanef (1995, hal 1), sebagai berikut :

”Pemberdayaan wisata adalah segala kegiatan dari usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua prasarana dan sarana barang dan jasa, fasilitas yang digunakan untuk melayani kebutuhan wisatawan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan sektor pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha untuk memperkuat sektor pariwisata dengan cara menarik minat wisatawan untuk berkunjung kedaerah tujuan wisata.

1. Pengertian Wisata

Wisata memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh banyak ahli. Menurut Lundberg dalam (Kusmayadi, 2000, h.4) dinyatakan bahwa Wisata adalah konsep umum yang sejarahnya kembali kemasa yang lampau atau sebelumnya, dan definisinya terus berubah. Sebagai suatu konsep, pariwisata dapat ditinjau dari berbagai segi yang berbeda. Pariwisata dapat dilihat suatu kegiatan melakukan perjalanan dari rumah dengan maksud tidak melakukan usaha atau bersantai (Kusmayadi, 2000, h. 4). Pariwisata dapat juga dilihat sebagai suatu bisnis, yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan dan menyangkut setiap pengeluaran oleh atau untuk wisatawan / pengunjung dalam perjalanannya (Kusmayadi, 2000, h. 4). Sedangkan menurut (Soekadijo, 2000, h. 2) pariwisata adalah kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Selanjutnya dijelaskan Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata. Sedangkan usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.

Institut of Tourism in Britain (sekarang *Tourism Society in Britain*) di tahun 1976 mendefinisikan:

Pariwisata sebagai kepergian orang-orang untuk sementara dalam jangka waktu pendek ketempat tempat tujuan diluar tempat tinggal dan tempat bekerja sehari hari, syarat kegiatan-kegiatan mereka selama berada ditempat tempat tujuan tersebut; ini mencakup kepergian untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan sehari atau darmawisata (Kusmayadi, 2000, h. 4).

Mc Intosh dan Shashikant Gupta dalam (Kusmayadi, 2000, h. 5) mencoba merumuskan suatu konsepsi mengenai pariwisata yang dapat dipergunakan sebagai pegangan untuk membangun industri, yang dinamakan industri pariwisata. Mereka mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis pemerintah tuan rumah, serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan serta pengunjung lainnya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Wisata dapat dilihat dari berbagai sisi, baik dari sisi bisnis, industri maupun tujuan pelakunya, pariwisata dilihat dari sisi bisnis berhubungan dengan penyediaan barang dan Jasa bagi wisatawan dan menyangkut setiap pengeluaran oleh atau untuk wisatawan / pengunjung. Pariwisata, dilihat dari sisi industri berhubungan dengan upaya membangun industri dari sektor wisata. Wisata dilihat dari sisi tujuan pelakunya berhubungan dengan apa yang ingin dicapai oleh orang yang berwisata, misalnya sebagai suatu kegiatan melakukan perjalanan dari rumah dengan maksud tidak melakukan usaha atau untuk bersantai.

Kegiatan dari usaha Pariwisata tersebut adalah:

- a. Kegiatan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam, obyek dan daya tarik wisata budaya dan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.
- b. Usaha yang berhubungan dengan menyediakan sarana dan prasarana wisata seperti penyediaan angkutan wisata, jasa biro perjalanan, penginapan, perhotelan, souvenir dan lainnya.
- c. Usaha lain yang terkait dengan kegiatan pengembangan sektor Wisata seperti pengembangan Sumber Daya Manusia, upaya promosi dan pemasaran produk wisata (Mussanef, 1995)

Kegiatan seperti tersebut diatas menggunakan fasilitas sarana dan prasarana dan faktor penunjang lainnya yang disediakan dan diadakan oleh pemerintah, dunia usaha masyarakat sehingga diperlukan adanya pengaturan, pengurusan dan pelayanan yang baik dan memadai sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wisatawan.

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam pengembangan sektor wisata dan seni budaya Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya pengembangan sarana prasarana wisata seni budaya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah :

a. Sarana wisata.

Menurut (Oka A. Yoeti, 1982. h. 179) Sarana Wisata dapat diartikan” Semua bentuk perusahaan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan, tetapi hidup dan kehidupannya tidak selamanya akan tergantung kepada wisatawan”.

Dari pengertian diatas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan sarana wisata adalah perusahaan-perusahaan yang kegiatannya adalah melayani wisatawan dan kehidupannya tergantung pada kunjungan wisatawan.

Sarana Wisata ini meliputi sarana pokok, sarana pelengkap dan sarana penunjang wisata. Untuk lebih jelasnya penulis kemukakan secara rinci sebagai berikut :

1. Sarana Pokok Wisata.

Sarana pokok wisata yaitu merupakan fasilitas minimal yang harus terdapat pada suatu daerah tujuan wisata. Pada dasarnya perusahaan yang mengelola sarana ini, hidup dan penghidupannya sangat tergantung pada lalu lintas wisatawan. Adapun yang termasuk dalam sarana pokok wisata tersebut meliputi sarana perhubungan, sarana angkutan wisata, Hotel dan jenis akomodasi lainnya, Restoran, obyek wisata dan atraksi wisata.

2. Sarana pelengkap.

Sarana pelengkap Wisata yaitu merupakan fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok sehingga fungsi sarana pelengkap ini dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah atau tempat yang dikunjungi. yang termasuk sarana pelengkap tersebut seperti fasilitas olahraga.

3. Sarana penunjang wisata.

Sarana penunjang wisata yaitu fasilitas yang diperlukan untuk menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap, yang fungsinya agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya. Yang

termasuk sarana pelengkap tersebut adalah night club, Souvenir Shop, bioskop dan fasilitas yang membuat wisatawan merasa betah di tempat obyek wisata.

2. Jenis- jenis Wisata.

Setiap Daerah memiliki potensi yang berbeda-beda antar satu dengan yang lain. Termasuk didalamnya jenis Wisata di daerah mempunyai ciri-ciri sendiri untuk dikembangkan oleh pemerintah masing-masing untuk keperluan perencanaan dan pengembangan. Dari jenis-jenis Wisata tersebut harus dibedakan sehingga dengan demikian dapat ditentukan kebijakan apa yang dapat mendukung sektor wisata tersebut. Potensi-potensi wisata yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dipengaruhi oleh letak geografis dari kawasan wisata tersebut.

Menurut Yoeti (1997), jenis- jenis wisata antara lain:

1. Wisata Untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Jenis Wisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar, menikmati keindahan alam, mendapatkan ketenangan dan kedamaian di luar kota.

2. Wisata untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)

Ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki hari liburnya untuk istirahat, memulihkan kesegaran. Biasanya mereka tinggal selama mungkin ditempat yang mereka anggap benar menjamin tujuan rekreasi, misal ke pantai maupun ke pegunungan.

3. Wisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Ditandai dengan rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar dipusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup, peninggalan masa lampau, kesenian dan tarian rakyat.

4. Wisata untuk Olahraga (*Sport Tourism*)

Jenis Pariwisata olahraga (sport tourism) dibagi menjadi 2 :

- a) Big Sport Event: peristiwa olahraga besar yang menarik banyak minat.
- b) Sporting Tourism of practitioner : pariwisata bagi mereka yang ingin mempraktekkan sendiri. (Yoeti, 1997)

Selain itu (Pendit 1994, h. 34) juga mengklasifikasikan jenis wisata yang sudah dikelompokan yaitu:

1. Wisata Cagar Alam : jenis wisata ini terkait dengan kegemaran akan keindahan alam, hawa udara yang segar, pegunungan dan marga satwa serta tumbuh-tumbuhan.
2. Wisata Budaya : Tujuannya adalah ingin memperluas pandangan hidup dan kunjungan ke tempat lain / keluar negeri, mempelajari keadaan masyarakat setempat, kebiasaan adat istiadat, cara hidup, budaya dan kesenian daerah.
3. Wisata Bahari : Wisata ini dihubungkan dengan olahraga air/ laut seperti memancing, berlayar, menyelam, selancar serta berbagai rekreasi perairan lainnya.

4. Wisata Komersial : Mengadakan perjalanan mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang dengan dimeriahkan berbagai atraksi seni.
5. Pilgrim : dikaitkan dengan Agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok masyarakat dengan cara mengunjungi tempat-tempat suci, makam orang besar, pemimpin yang diagungkan, tempat penuh legenda, bukit / gunung yang dianggap keramat.

3. Pengertian Seni Budaya Daerah.

a. Konsep Seni budaya Daerah.

Seni merupakan proses kreatifitas imajinatif dan ekspresif estetik yang terwujud dari suatu karya yang indah dan mampu memberikan kepuasan bagi penciptanya maupun penikmatnya, dengan seni manusia mampu mengungkapkan sesuatu yang menurutnya paling esensi dalam kehidupannya. Yoeti (1997) menyatakab bahwa seni mencerminkan pergumulan manusia dengan kehidupannya, karena melalui seni manusia berupaya mencari makna hidupnya, dan seni juga merupakan media yang fleksibel bagi manusia untuk berekspresi.

Sedangkan menurut Pendit (1994), seni adalah bagian dari kebudayaan. Kata “Kebudayaan” berasal dari kata sansakerta *budhayah*, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan” hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Sedangkan budaya merupakan perkembangan majemuk dari budi daya’ yang berarti “daya dari budi”. Sehingga dibedaka antara budaya yang berarti daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa dengan kebudayaan yang bararti hasil dari cipta, karsa dan rasa.

Istilah kebudayaan dalam bahasa asing adalah *Culture* (inggris), kultur (Jerman) dan *kultuur* (Belanda). Pendit (1994) menafsirkan etimologi culture yang berarti memelihara atau memperkembangkan jiwa. Dari berbagai macam definisi tentang kebudayaan para ahli di Indonesia sepakat untuk mengartikan kebudayaan tidak sebagai suatu sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku tidak secara individu maupun kelompok.

Jika dalam proses selanjutnya, seni budaya daerah menjadi kebanggaan semua warga negara indonesia, maka dapat dikatakan seni budaya daerah tersebut menjadi unsur kebudayaan nasional. Dalam konteks ini, wujud identitas ditonjolkan bisa bermakna ganda, yakni sebagai identitas kedaerahan (dari daerah mana seni budaya itu bersala) yang sekaligus mencerminkan ciri Kebhinekaan bangsa indonesia, dan dipihak lain sebagai identitas nasional yang merupakan manifestasi Ke-tunggal Ika-an bangsa Indonesia.

b. Manfaat Seni Budaya.

Seni budaya memiliki beberapa manfaat, baik bagi individu maupun proses pembangunan pada suatu negara. Adapun manfaat dari seni budaya (Deparsenibud) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan identitas bagi suatu negara (berupa identitas nasional) dan juga daerah darimana seni budaya tersebut berasal (yaitu identitas kedaerahan).
2. Dapat menekan dampak dari pembangunan dan modernisasi.
3. Apabila bersentuhan dengan seni budaya lain, akan meningkat harkat, kehormatan, dan pemahaman tentang arti kemanusiaan.

4. Mengandung ajaran yang berisi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, serta mengajarkan sifat gotong royong.
5. Dapat digunakan untuk mempromosikan kepariwisataan secara umum, baik dalam maupun luar negeri.
6. Produk Seni budaya akan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan masyarakat.
7. Penampilan seni budaya dapat menjadi hiburan masyarakat.
8. Penampilan seni budaya dapat digunakan sebagai suatu hiasan untuk menambah keindahan.
9. Dana yang dihasilkan dari penjualan produk seni budaya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
10. Peran pemerintah Daerah Dalam pengembangan Sektor wisata seni Budaya.

Terwujudnya daerah otonom dengan asas desentralisasi yang mana dalam hal tersebut pemerintah daerah dalam rangka pengembangan sektor Wisata dan Seni Budaya khususnya sub sektor pariwisata pada obyek dan daya tarik pariwisata, memiliki fungsi dan peranan untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi daerahnya.

Mengingat bahwa sektor wisata dan Seni budaya merupakan sektor potensial dan salah satu sektor andalan dalam usaha pembangunan daerah. Maka perlu adanya pembinaan dan pengembangan yang lebih terarah dan terpadu. Untuk itu peran dari berbagai pihak sangat diperlukan khususnya pemerintah daerah yang terkait dengan usaha pengembangan wisata seni budaya tersebut.

Adapun tugas pemerintah daerah secara umum dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dalam himpunan tentang kepariwisataan adalah sebagai berikut :

Tugas Pemerintah daerah dalam rangka usaha pengembangan pariwisata adalah membantu dan melaksanakan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menciptakan iklim dan kondisi yang sehat di daerahnya serta mengadakan sarana dan prasarana yang termasuk kewajiban kesemuannya yang dapat memperlancar perkembangan pariwisata pada umumnya.

Sesuai dengan Peraturan Propinsi Jawa Timur No 15 tahun 2000 mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas Pariwisata daerah Propinsi Jawa Timur yang berisi tentang fungsi dan tugas dinas tersebut yakni :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis pembangunan kepariwisataan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
2. pembinaan obyek dan daya tarik wisata serta pesona wisata budaya sebagai pemikat wisatawan.
3. penyelenggaraan dan pembinaan pemasaran dan hubungan kepariwisataan dan lembaga dan pemasaran dan hubungan kepariwisataan dengan lembaga dan pasar wisata didalam dan diluar negeri.
4. Penyelegaraan usaha jasa dan usaha sarana wisata.
5. Penyelenggaraan dan penyusunan program dan pengendalian pengembangan pariwisata.

6. Penyelenggaraan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia pariwisata penggalangan dan pemberdayaan pern serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
7. Pengkoordinasian pengembangan, pengelolaan, dan pemberdayaan produk pariwisata Jawa Timur sebagai satu kesatuan daerah tujuan wisata.
8. Pelaksana tugas ketata usahaan

Sedang tugas dan fungsi dinas pariwisata sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Kepariwisata (1999) adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pemberian perijinan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati kepala daerah serta pertauran perundangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok yang dimaksud adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kepariwisataan dan tugas pembentukan yang diperdakan oleh bupati kepala daerah kepadanya
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis atas tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati kepala daerah berdasar peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun peranan dan Dinamisasi Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor wisata seni budaya adalah merupakan unsur pembaharu pendorong pembangunan serta pengembangan wisata seni budaya serta pembangunan nasional. Sedangkan untuk dapat melaksanakan fungsi dan peranya,

pemerintah daerah berdasarkan Surat keputusan Menteri perhubungan No 5 K. 72/UU/ 1996 BAPARDA (Pendit, 1994. h. 64) adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian, research, merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan kepariwisataan pada tingkat kepala Daerah, sehingga tercapai suatu usaha yang terkordinir dan terarah menuju pengembangan pariwisata di vdaerah yang bersangkutan secara menyeluruh.
2. Menggerakkan dan mendayagunakan potensi di daerah yang dapat diarahkan menuju pengembangan pariwisata di daerah yang bersangkutan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan usaha-usaha pengembangan pariwisata yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.
4. Ikut serta dalam kerja sama antar daerah dalam mewakili daerahnya pada tingkat pemerintah pusat sehingga peranan dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah sebagai unsur pembaharu / *Development agent* dalam pendorong bagi pembangunan dan pengembangan pariwisata serta pembangunan nasional pada umumnya, mengatur dan mengadakan promosiked daerah lain dan mengadakan pembinaan kepada masyarakat, dengan cara ini diharapkan upaya pengembangan sektor Wisata seni budaya dilakukan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.

Selain pernyataan diatas, tugas pemerintah dalam rangka usaha pengembangan pariwisata adalah membantu dan melaksanakan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat menciptakan iklim dan kondisi yang sehat di

daerahnya serta mengadakan sarana dan prasarana yang termasuk kewajiban kesemuanya yang dapat memperlancar perkembangan pariwisata pada umumnya.

Sebagai pelaksana dan penanggung jawab penuh dari upaya-upaya pengembangan struktur Wisata dan Seni Budaya yang ditugaskan kepadanya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan tingkat atasnya menurut asas pembantuan.

Menurut (Yoeti, 1997) menyatakan bahwa pengembangan wisata dan Seni Budaya harus mempunyai pengembangan yang berencana serta menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya. Peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Wisata dan Seni Budaya dalam garis besar adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik) memperluas berbagai bentuk pariwisata, kegiatan kordinasi antara pemerintah dengan pihak swasta, maka yang perlu diperhatikan keadaan infrastruktur dan sarana-sarana wisata yang menuju kedaerah tersebut.

D. Kontribusi Wisata dan Seni Budaya terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kata kontribusi memiliki beberapa pengertian, dalam kamus besar bahasa Indonesia Kontribusi diartikan uang iuran (kepada perkumpulan, dan sebagainya), atau sumbangan dalam artian sesuatu yang diberikan untuk membantu, bantuan, sokongan. Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud Kontribusi Wisata Seni Budaya terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah bentuk sumbangan apa dan seberapa besarkah sumbangan yang diberikan oleh sector Wisata Seni Budaya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo.

1. Pendapatan Asli Daerah.

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Musanef, 1995: h. 41) Pendapatan Daerah diartikan secara luas. Pendapatan meliputi tidak saja pendapatan asli daerah (PAD), akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan Pemerintah Pusat yang realisasinya dapat saja berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut (Yoeti, 1997) pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157 dikatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan. Dan
3. Lain-lain pendapatan yang dianggap sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menurut (Azhari. A. Samudra, 1995, h.41) diartikan merupakan pengertian dalam arti sempit. Sebab dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah. Pengertian pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berada dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. jadi pemungutan yang dilakukan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dilakukan apabila tidak ada peraturan yang mendasarinya, yaitu peraturan Daerah

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah Dari sektor Wisata dan Seni Budaya

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Sehubungan dengan hal itu maka hendaknya daerah memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangan sendiri.

Bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Wisata dan Seni Budaya terdiri atas :

a. Pajak Daerah

Menurut (Sunarto, 1983, h.36) yang dimaksud Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah dan berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.

Adapun Pajak Daerah yang berhubungan dengan sektor Pariwisata adalah:

1. Pajak Hotel dan Restoran.

Adalah Pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Hotel adalah bangunan yang khususnya disediakan bagi orang-orang untuk dapat beristirahat, menginap, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainya dengan dipungut bayaran. Sedangkan Restoran dan Rumah Makan adalah tempat menikmati makanan/minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

Sedangkan subyek pajak yang menanggung pajak hotel dan restoran adalah pengusaha Hotel dan Restoran dengan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10 % atas jumlahj pembayaran yang dilakukan kepada Hotel dan restoran tersebut.

2. Pajak Hiburan.

Adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, / keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton / dinikmati oleh setiap orang dan dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk fasilitas olahraga. Tarif pajak hiburan dikenakan paling tinggi 10 % atas jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menikmati hiburan.

b. *Retribusi Daerah.*

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian ijin tertentu yang khusus yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan organisasi / badan. Yang menjadi obyek Retribusi

adalah semua jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tetapi tidak semua jenis jasa yang diberikan pemerintah Daerah dapat dipungut, Retribusi hanya jenis jasa-jasa tertentu yang hanya menurut pertimbangan ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi.

Obyek Retribusi yang berkaitan dengan sektor Pariwisata adalah Retribusi yang harus dibayar oleh badan / pribadi yang menggunakan jasa dan dihitung dari perkalian antara pengguna jasa dan tarif retribusi. Dan tingkat penggunaan jasa dinyatakan sebagai kualitas pengguna jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipakai Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Atas dasar tersebut maka diperlukan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

a. *Intensifikasi*

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti.

Dalam upaya intensifikasi mencakup aspek. Sebagaimana dikemukakan oleh Dedy (Halim, 2004: 109-110) berikut:

1. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/Organisasi pengelola, berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan system dan prosedur secara optimal.
2. Memperbaiki/ Menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik Administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian/ Penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, dan penyesuaian system pelaksanaan pungutan.
3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi pengawasan dan pengendalian yuridis, pengawasan dan pengendalian teknis, dan pengawasan dan pengendalian penatausahaan.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia, dapat merupakan usaha positif dalam menggerakkan dan mengarahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat.

b. *Ekstensifikasi.*

Langkah Ekstensifikasi dimaksudkan untuk menambah jumlah wajib pajak yang belum terjalin sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa Ekstensifikasi lebih melibatkan usaha-usaha yang bersifat eksternal, seperti menambah wajib pajak baru, menciptakan pajak-pajak baru maupun upaya memperluas ruang lingkup pajak.

Apabila dilihat dari hasil yang akan dicapai, maka dapat dikemukakan bahwa upaya ekstensifikasi yang memungkinkan untuk dilaksanakan mengarah pada perluasan ruang lingkup sektor Wisata. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu :

1. Menambah wajib pajak baru dengan menemukan pajak obyek baru.
2. Memperluas ruang lingkup yang sudah ada.

E. Hambatan dalam pemberdayaan Wisata, Seni dan Budaya

Menurut Halim (2004) ada beberapa faktor penghambat dalam pengembangan wisata dan seni budaya antara lain:

1. Kurang terpadunya pengembangan pariwisata dengan pengembangan sektor lain yang mendukung. Hal ini dapat di cerminkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukungnya seperti misalnya jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, listrik dan air bersih di sejumlah daerah tujuan wisata.
2. Keterbatasan Dana yang tersedia sehingga pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dilaksanakan secara optimal, dan hal inilah yang menjadi permasalahan yang utama.

3. Masih kurangnya peran serta dunia usaha wisata dan seni budaya perlu ditingkatkan mengingat citra positif produk wisata sangat ditentukan oleh para pelaku usaha pariwisata.
4. Informasi tentang kepariwisataan yang disediakan masih terbatas dan banyak perlu dimutakhirkan datanya dan khususnya informasi tentang wisata dan seni budaya sangat terbatas.
5. Masih kurangnya barang-barang cinderamata dan masih perlu dikembangkan, baik yang menyangkut cinderamata yang mudah dibawa yang mencerminkan ciri khas daerah maupun produksi-produksi yang dengan kemasan yang menarik dan harga yang terjangkau.
6. Mutu produksi dan pelayanan wisata yang ada perlu ditingkatkan terutama akomodasi, penyajian obyek dan daya tarik wisata yang kurang direncanakan sehingga memberi kesan kurang menarik.
7. Fasilitas jalan untuk menuju obyek wisata khususnya ngebel sangat sempit dan berkelok-kelok padahal obyek wisata ini menjadi tujuan utama wisata hal ini yang menjadi kendala-kendala pengembangan sektor wisata dan menyebabkan penghambatnya pengembangan wisata.
8. Persaingan untuk mendapat pangsa pasar wisatawan mancanegara semakin tajam.

Sedangkan menurut Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, ada beberapa faktor penghambat dalam pengembangan wisata dan seni budaya antara lain:

1. Kurang terpadunya pengembangan pariwisata dengan pengembangan sektor lain yang mendukung. Hal ini dapat di cerminkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukungnya seperti misalnya jaringan transportasi,

jaringan telekomunikasi, listrik dan air bersih di sejumlah daerah tujuan wisata.

2. Keterbatasan Dana yang tersedia sehingga pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dilaksanakan secara optimal, dan hal inilah yang menjadi permasalahan yang utama.
3. Masih kurangnya peran serta dunia usaha wisata dan seni budaya perlu ditingkatkan mengingat citra positif produk wisata sangat ditentukan oleh para pelaku usaha pariwisata.
4. Informasi tentang kepariwisataan yang disediakan masih terbatas dan banyak perlu dimutakhirkan datanya dan khususnya informasi tentang wisata dan seni budaya sangat terbatas.
5. Masih kurangnya barang-barang cinderamata dan masih perlu dikembangkan, baik yang menyangkut cinderamata yang mudah dibawa yang mencerminkan ciri khas daerah maupun produksi-produksi yang dengan kemasan yang menarik dan harga yang terjangkau.
6. Mutu produksi dan pelayanan wisata yang ada perlu ditingkatkan terutama akomodasi, penyajian obyek dan daya tarik wisata yang kurang direncanakan sehingga memberi kesan kurang menarik.
7. Fasilitas jalan untuk menuju obyek wisata khususnya ngebel sangat sempit dan berkelok-kelok padahal obyek wisata ini menjadi tujuan utama wisata hal ini yang menjadi kendala-kendala pengembangan sektor wisata dan menyebabkan penghambatnya pengembangan wisata.
8. Persaingan untuk mendapat pangsa pasar wisatawan mancanegara semakin tajam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu dengan melalui penggambaran dan menguraikan keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta dan berusaha mencari jalan pemecahannya. Dengan metode penelitian akan diperoleh data dan informasi yang mendukung analisa dalam penulisan skripsi ini, selain itu juga akan menjadi jelas dan terfokus ruang lingkup penelitiannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2001; 15) yang mengatakan bahwa:

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.”

Dengan demikian, penelitian secara deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada secara aktual serta mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Sedangkan menurut Sugiyono, metode penelitian administrasi atau manajemen dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi dan manajemen.

Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian, serta obyeknya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2000:3) adalah “sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Pengertian metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Tujuan dari penelitian Deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003 h.54). Berhubungan dengan hal ini menerangkan:

” Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala/ keadaan dan tidak bermaksud menguji hipotesis.”

Penulis berusaha memberikan gambaran secara tepat dengan jelas mengenai sifat-sifat atau keadaan, situasi kondisi, gejala atau perkembangan gejala dalam hubungan antara obyek penelitian dengan gejala kemasyarakatan lainnya.

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena dengan jenis penelitian deskriptif peneliti dapat menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada secara actual serta mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

B. Fokus Penelitian

Menurut (Moleong, 2005 hal. 97) fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.

Jadi, fokus penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti, dalam hal ini mengkhususkan data-data yang berkaitan dengan judul atau topik penelitian yang akan diteliti untuk diambil data-datanya, sehingga mempermudah peneliti menemukan serta memilih data-data mana yang diperlukan untuk suatu penelitian.

Pembatasan fokus akan sangat penting berkaitan dengan masalah maupun data yang akan dikumpulkan dan diolah untuk dianalisa. Maka agar penelitian ini nantinya lebih terarah dan mudah dalam pencarian data, terlebih dahulu harus ditetapkan fokusnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah :

1. Kondisi potensi pariwisata di Kabupaten Ponorogo saat ini.
2. Pendayagunaan potensi pariwisata di Kabupaten Ponorogo.
3. Upaya pemberdayaan potensi pariwisata di Kabupaten Ponorogo dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
4. Faktor pendukung dan penghambat upaya pemberdayaan potensi pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan Asli daerah di Kabupaten Ponorogo.

C. Lokasi dan situs penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena kabupaten Ponorogo memiliki suatu Wisata dan Seni budaya yang cukup unik dan yang perlu dikembangkan dan perlu dilestarikan.

Situs dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo. Situs ini dipilih karena merupakan instansi yang berkaitan langsung dengan obyek yang diteliti.

D. Jenis dan Sumber Data.

Penelitian memerlukan data baik untuk deskripsi maupun untuk menjawab permasalahan, Data tersebut merupakan fakta yang dikumpulkan dalam penelitian. Penelitian ini membutuhkan data Primer dan Data Sekunder untuk menyelesaikan permasalahan.



1. Data Primer

Adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh si peneliti dari sumbernya yaitu dari:

- a. Kepala Dinas Pariwisata Dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo Daerah Kabupaten Ponorogo.
- b. Pegawai Pada Kantor Dinas Pariwisata dan Seni budaya Kabupaten Ponorogo.
- c. Petugas Operasional Lapangan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo.

2. Data Sekunder

Diperoleh dari Dokumen catatan Laporan serta arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian yang ada pada kantor Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang dipilih dan digunakan proses pengumpulan data tergantung pada sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan menggunakan teknik lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung pada subyek atau obyek penelitian, dimana dengan cara ini diharapkan diperoleh data seobyektif mungkin.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

1. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk melihat dan mengamati keadaan lokasi penelitian dan selanjutnya mengumpulkan data yang diperlukan. Metode yang digunakan adalah tehknik observasi dalam arti tidak ada interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Penulis hanya melakukan pengamatan secara langsung dilapangan sekaligus mencatat setiap gejala / fenomena yang terjadi dan ada kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti untuk menjadi bahan atau data yang diperlukan.

2. Wawancara/ Interview

Peneliti mengadakan tatap muka dan wawancara dengan para informan untuk menggali data secara langsung, dengan komunikatif dan dialogis sehingga dari wawancara tersebut diperoleh suatu data dengan akurasi yang tinggi. Dengan maksud untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat diketahui pelaksanaan tugas dan fungsi dari staf pegawai Dinas pariwisata dan seni Budaya Kabupaten Ponorogo.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan pencatatan terhadap sumber-sumber data yang ada pada lokasi, misalnya dalam bentuk table, daftar, dan sebagainya. Dokumentasi diperoleh dari arsip Pemerintah Kabupaten Ponorogo terutama dari dinas Pariwisata dan seni budaya Kabupaten Ponorogo.

F. Instrumen Penelitian.

Suatu penelitian memerlukan instrumen dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel - variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian. Beliau menambahkan agar data yang dikumpulkan memenuhi persyaratan atau dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka petugas pengumpul data dan alat bantu (instrumen) pengumpul data haruslah memenuhi kriteria yang diperlukan. oleh karena itu agar data mengenai variabel-variabel penelitian yang dibutuhkan bisa didapatkan, maka penelitian ini menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Peneliti, Sebagai instrumen kunci dengan menggunakan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu kerangka pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian. hal ini berguna untuk mengarahkan peneliti dalam pencarian data pada saat wawancara dilakukan.
3. Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis, dan alat Bantu lain untuk merekam dan mencatat data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri pada awal penelitian peneliti merupakan alat satu-satunya. Setelah peneliti terjun langsung ke lapangan barulah digunakan wawancara dan catatan-catatan lain yang digunakan sebagai alat penelitian. Sehingga dari kegiatan



tersebut diperoleh data yang spesifik dari responden. Dengan demikian instrumen yang digunakan dari awal hingga akhir penelitian adalah peneliti sendiri.

G. Analisa Data.

Analisa data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan dan berguna dalam memecahkan masalah yang diteliti. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 2003, h.346).

Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif. (Narbuko 2003,h. 179) mengatakan bahwa analisis deskriptif adalah mentransformasi data mentah kedalam bentuk data yang mudah dimengerti dan ditafsirkan, serta menyusun memanipulasi serta menyajikan supaya menjadi suatu informasi. Beliau menambahkan bahwa proses mengubah data menjadi suatu informasi memerlukan suatu interpretasi-interpretasi yang tepat agar tidak terjadi kesalahan informasi. Interpretasi merupakan penafsiran data dengan mencari pengertian yang lebih luas dengan hasil penelitian (Narbuko 2003,h.169). Penafsiran atau interpretasi terhadap data yang diperoleh, terutama data yang langsung berhubungan dengan fokus yang dilakukan oleh peneliti diharapkan akan menggambarkan pandangan peneliti sesuai dengan pemahaman terhadap teori hasil kepustakaan yang relevan.

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan, menurut (Moleong, 2005) terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data.

Yaitu merupakan sekumpulan informasi disusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, kemudian untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data akan berupa tabel, gambar, hasil wawancara dan data-data dokumen yang mendukung penyajian data.

3. Penarikan kesimpulan (*concluding drawing*)

Merupakan verifikasi data penelitian yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan longgar, tetap terbuka dan semakin lama semakin menjadi terperinci berdasarkan kumpulan-kumpulan data yang diperoleh dilapangan, kemudian dianalisis data-data tersebut untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

1. Sejarah Ponorogo

Ponorogo adalah kota indah yang terletak di dekat perbatasan Jawa Tengah yang berjarak sekitar 150 kilometer sebelah tenggara Solo Jawa Tengah dan kira-kira 180 kilometer barat daya dari Surabaya ibukota Jawa Timur. Udara di kota ini cukup sejuk karena Ponorogo terletak pada 92-2.563 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 1.371,78 kilometer persegi.

Kata Ponorogo berasal dari bahasa Jawa yaitu *pono* dan *rogo*. "*pono*" yang berarti perasaan atau naluri yang peka untuk melihat sesuatu yang akan terjadi, sedangkan "*rogo*" berarti orang atau personal. Jadi, Ponorogo memiliki arti seseorang atau orang yang memiliki kemampuan dari dalam atau naluri untuk memahami pikiran terpendam seseorang dan memiliki kemampuan yang mendalam atau kekuatan untuk mengambil keputusan.

Menurut sejarahnya, kota Ponorogo ditemukan oleh Pangeran Batoro Katong, Putra Brawijaya V yang juga sebagai Raja Terakhir Kerajaan Mojopahit. Saat ini kuburan Pangeran Batoro Katong berada Kecamatan Setono, sekitar tiga kilometer sebelah timur Pendopo Kabupaten.

Untuk membangkitkan partisipasi masyarakat untuk ikut ambil bagian secara aktif dalam mengembangkan wilayahnya, pemerintah

mensosialisasikan suatu selogan yang diberi nama “REOG”. Alasan mengapa pemimpin setempat menggunakan slogan sama dengan nama Kesenian daerahnya adalah untuk mempermudah masyarakat mengingatnya. Disini, REOG melambangkan Resik (bersih), Endah (indah), ombor (berpikiran luas atau demokrasi) dan Girang-Gemirang (senang). Jadi, program pemerintah daerah Ponorogo ini mengandung arti bagaimana menciptakan wilayah Ponorogo ini menjadi wilayah kota yang bersih indah dan orang yang tinggal didalamnya hidup senang dan demokratis.

2. Keadaan Geografis

a) *Batas Administrasi.*

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Timur yang mempunyai luas 1.371.78 km² yang terletak antara 111⁰17' – 111⁰ 52' Bujur Timur dan 7⁰ 49' – 8⁰ 20' Lintang Selatan. Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung, Trenggalek
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri dan Pacitan

Kabupaten Ponorogo merupakan daerah dataran dan daerah berbukit yang berada di ketinggian antara 92 m sampai dengan 2.563 m diatas permukaan laut. Sedangkan kemiringan daratan menunjukkan 0,4% sampai dengan 40%.

Dilihat dari keadaan geografisnya, kabupaten ponorogo dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngaryun, Sooko dan Pulung serta kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai 58 km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah. Sedang sisanya digunakan untuk tegal pekarangan dan lainnya.

b) Luas Daratan.

Terdiri dari :

- Pemukiman atau kampung : 201.20 km².
- Persawahan : 486.35 km².
- Pertanian Tanah Kering : 296.22 km².
- Hutan : 332.95 Km.
- Kolam, Danau, Waduk : 1.99 km².
- Tanah tandus / alang-alang : 155.63 km².
- Lain-lain : 28.57 km².

c) Iklim dan Curah Hujan

Lokasi Kabupaten Ponorogo berada di sekitar garis Khatulistiwa, maka seperti kabupaten - kabupaten lainnya di Jawa Timur Kabupaten Ponorogo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya yakni musim

kemarau dan musim penghujan. bulan September – April merupakan musim penghujan, Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei –Agustus. Keadaan cuaca dan curah hujan, pada tahun 2004 terlihat bahwa pola musim penghujan dan musim kemarau tetap terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya.

d) Fisiografi.

1. Ketinggian tempat.

Sebagian besar dataran diwilayah Kabupaten Ponorogo terletak antara 100 – 500 mdpl. (58,79) dan 500 – 1000 m dpl, (25.83 %). Beberapa tempat dengan ketinggian diatas 1000 m dpl. Terdapat di wilayah Kec. Sooko, Ngebel dan Pulung.

2. Jenis Tanah.

Kabupaten Ponorogo mempunyai beberapa jenis tanah : sebagian besar didominasi oleh kompleks Litosol (19,90 %), Litosol (19,23 %), Alluvial Kelabu (17,15 %) dan Asosiasi Alluvial kelabu (11,49 %), sedangkan sisanya antara lain adalah jenis tanah Mediteran coklat tua, alluvial kelabu coklat.

3. Struktur Tanah.

Berdasarkan struktur geologi wilayah kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 8 macam, terluas adalah Endapan Pliosen, Vulkanik Quarter dan Aluvium, sedangkan lainnya dalam areal yang kecil-kecil berupa Batuan Cadas, Vulkanik Quarter muda, Diorit dan batuan kapur.

4. Klimatologi.

Klimatologi erat kaitannya dengan letak ketinggian tempat, oleh karena itu kabupaten Ponorogo mempunyai iklim tropis dan sebagian sub tropis.

5. *Topografi.*

Pada umumnya Kabupaten Ponorogo terbagi dalam dua keadaan topografi, pertama area dataran tinggi dan dataran rendah. Di Kabupaten Ponorogo juga dilintasi sungai-sungai yang kesemuanya berjumlah 14 sungai dengan panjang antara 4 km sampai 58 km. Sungai-sungai tersebut merupakan air irigasi yang sangat penting bagi lahan pertanian penduduk.

3. **Keadaan Pemerintahan.**

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah, wilayah atau negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu kabupaten di propinsi Jawa Timur, mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten-kabupaten lain. Unit pemerintahan dibawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Masing-masing terdiri dari beberapa desa.

Secara Administratif Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan 303 kelurahan dan desa dengan 2.293 RW / 6.741 RT. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo didukung oleh 7.663 PNS baik pusat maupun daerah serta 3.857 aparat pamong desa. Dalam pelaksanaan Pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, di Ponorogo selalu mengacu pada program pembangunan Jawa Timur, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembinaan kerukunan umat beragama yaitu berorientasi kepada peningkatan wawasan kebangsaan dan keamanan swakarsa.

a) Visi Kabupaten Ponorogo

Terwujudnya Kabupaten Ponorogo menjadi daerah yang sejahtera, berkeadilan dan berakhlak mulia dalam rangka **“Mukti Wibowo 2010”**. Visi tersebut secara harfiah dapat dijelaskan, bahwa mukti wibowo berarti sejahtera/berkedudukan mapan, serba berkecukupan; sedangkan wibowo maksudnya adalah mendapat kehormatan / dipandang hormat karena aura yang terpancar dari diri, bukan karena takut atau dipaksa. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2010 Kabupaten Ponorogo menjadi daerah yang masyarakatnya sejahtera, memiliki derajat yang tinggi dan dihormati karena kebesaran / kejayaan.

b) Misi Kabupaten Ponorogo

1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat;
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah;
3. Memantapkan ketahanan pangan;
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
5. Meningkatkan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai agama;
6. Melestarikan apresiasi seni dan budaya;
7. Menciptakan lapangan kerja dan memperluas usaha baru.

c) Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, maka beberapa strategi yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;

2. Penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
3. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pembangunan infrastruktur;
4. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.;

d) Penduduk

Penduduk merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan, oleh karena itu data penduduk yang bersumber dari hasil sensus Penduduk maupun registrasi menjadi salah satu data pokok yang sangat diperlukan.

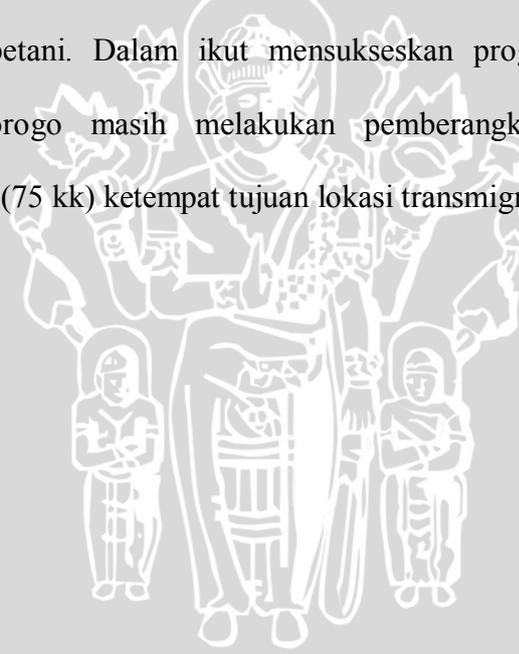
Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo sesuai dengan data yang diperoleh dari dinas kependudukan kabupaten Ponorogo hingga bulan juli 2006 keseluruhan adalah 944.243 jiwa yang terdiri dari 469.434 penduduk laki-laki dan 474.809 penduduk perempuan atau terdiri dari 933.895 WNI dan 197 WNA dengan kepadatan penduduk 628,28 jiwa/km². Sebagian besar penduduk beragama islam dan bermata pencaharian sebagai petani.

Menurut hasil registrasi penduduk kabupaten ponorogo pada akhir tahun mengalami perkembangan sebesar 0,45 % secara keseluruhan penduduk wanita sedikit lebih banyak di banding penduduk pria. Sex Ratio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan akhir tahun menunjukkan kenaikan, yaitu dari 96,70 % pada akhir tahun 2006 menjadi 96,80 % yang berarti penduduk di kabupaten ponorogo

penduduk perempuannya lebih banyak dibanding penduduk pria dimana setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk pria, dimana kondisi ini hampir merata di setiap kecamatan.

Jumlah tenaga kerja yang terdaftar didinas tenaga kerja kabupaten ponorogo pada tahun ini secara keseluruhan sejumlah 16.400 jiwa yang terdiri dari laki-laki 6.674 jiwa dan perempuan 9.726 jiwa, dengan berbagai latar belakang pendidikan.

Adapun sebagian besar mata pencaharian penduduk dikabupaten Ponorogo sebagai petani pengusaha sebesar 229.141 dan 145.794 orang orang sebagai petani. Dalam ikut mensukseskan program transmigrasi, kabupaten ponorogo masih melakukan pemberangkatan Transmigran sebesar 243 jiwa (75 kk) ketempat tujuan lokasi transmigrasi.



Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Kelamin, dan Kecamatan Tahun 2006.

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ngrayun	28.514	28.702	57.216
2	Slahung	26.179	27.642	53.821
3	Bungkal	18.118	19.259	37.377
4	Sambit	19393	20.177	39.570
5	Sawoo	30.449	31.540	61.989
6	Sooko	11.859	12.334	24.193
7	Pulung	24.751	25.662	50.413
8	Mlarak	19.429	17.537	36.966
9	Siman	19.860	20.368	40.228
10	Jetis	15.834	16.276	32.110
11	Balong	22.642	23.805	46.448
12	Kauman	21.729	22.148	43.877
13	Jambon	19.904	20.997	40.901
14	Badegan	15.539	15.839	31.378
15	Sampung	19.162	21.169	40.331
16	Sukorejo	26.008	27.224	53.232
17	Ponorogo	37.463	39.563	77.026
18	Babadan	31.747	31.966	63.713
19	Jenangan	27.134	27.731	54.865
20	Ngebel	10.299	10.714	21.013
21	Pudak	4.425	4.452	8.680
Jumlah		469.434	474.809	944.243

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kab. Ponorogo

e) Pendidikan.

Sumber daya manusia memegang peranan penting terhadap perkembangan kehidupan bangsa, sehingga pembangunan dibidang pendidikan merupakan bagian yang mutlak dari pembangunan. Pada tingkat

SDN bila dibandingkan dengan tahun ajaran lalu jumlah sekolah tetap 625 SDN, sedang murid guru dan lulusnya terjadi kenaikan sebesar 77.410 dan 5.202 orang . pada tingkat SLTP bila dibanding dengan tahun ajaran lalu jumlah sekolahnya 81 buah, guru dan lulusnya terjadi perubahan sebesar 2.085; 9.835 murid dan 30.107 orang. Sedangkan pada jenjang SMA dan SMK bila dibandingkan dengan tahun ajaran lalu jumlah sekolahnya 43 buah 18.812 murid.

Sedangkan keadaan Madrasah di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Ponorogo pada semua jenjang pendidikan jumlah Madrasah Ibtidaiyah 78 buah, madrasah stanawiyah 74 buah Madrasah aliyah 41 buah.

f) Sosial.

Jumlah organisasi kesenian yang ada di Ponorogo, kesenian Reog Ponorogo sejumlah 267 unit, seiring dengan program pemerintah kabupaten Ponorogo, karena Reog merupakan budaya asli Ponorogo, maka setiap Desa disarankan minimal harus ada 1 unit Reog sebagai ajang ketrampilan dan pagelarannya, pada setiap bulan Suro diadakan Festival Reog Nasional yang diikuti peserta dari penjuru Indonesia. Dengan tidak mengabaikan kesenian lainnya maka beberapa jenis kesenian juga mengalami perkembangan.

Selain dari kesenian yang terkenal di kabupaten Ponorogo mempunyai andalan tempat wisata ngebel yang merupakan wisata alam berupa Telaga Ngebel dengan ketinggian 734 meter diatas permukaan laut dengan ketinggian 734 meter diatas permukaan laut dengan panorama alam yang masih asli serta ditunjang hasil pertanian khususnya hortikultura seperti Durian, Alpokat,

Nangka dan lainnya. Selain itu masih ada lagi wisata alam di kecamatan Badegan, (kucur) serta Goalawa di kecamatan sampung.

Dalam rangka menunjang sub sektor kepariwisataan perlu kiranya tersedianya sarana penginapan yang memadai. Di Kabupaten Ponorogo terdapat 15 hotel maupun losmen yang siap menerima tamu baik wisatawan dalam maupun luar negeri.

B. GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA KABUPATEN PONOROGO.

Secara Hukum keberadaan dan kedudukan dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor :1 Tahun 2002 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo yang kemudian dijabarkan dalam keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 101 Tahun 2003 tentang : Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Seni budaya Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo nomor 101 tahun 2003 tersebut, maka Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo adalah unsur pelaksanaan pemerintah kabupaten Ponorogo yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

1. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan seni budaya;
2. Pelaksanaan pemberian perizinan dan pelayanan umum diibidang pariwisata dan seni budaya;
3. Pelaksanaan pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pariwisata dan seni budaya;
4. Pelaksanaan tata usaha Dinas;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

2. Tujuan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya

Sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan diatas maka tujuan tujuan jangka panjang tersebut dijabarkan kedalam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam jangka pendek. Dinas pariwisata dan Seni Budaya kabupaten Ponorogo Pada tahun 2006 telah menetapkan tujuan jangka pendek sebagai berikut :

- i. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengupayakan kabupaten Ponorogo sebagai salah satu Daerah tujuan wisata.
- ii. Mengembangkan dan melestarikan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo sehingga mampu menjadi faktor penunjang kepariwisataan

3. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya

Penetapan Visi sebagai bagian perencanaan strategik merupakan suatu langkah dalam organisasi. Dikatakan, Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Dengan demikian, Visi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten

Ponorogo adalah merupakan gambaran yang diinginkan oleh instansi ini tentang keadaan kepariwisataan di Kabupaten Ponorogo di masa depan. Adapun visi itu dirumuskan sebagai berikut: ***Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur.***

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

“ Mewujudkan Kabupaten Ponorogo sebagai Daerah Tujuan Wisata melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara terpadu dan menyuluh sesuai dengan posisi, tantangan dan tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo dalam System penyelenggaraan dan pembangunan di daerah ”

Penetapan misi ini merupakan pernyataan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Seni Budaya kabupaten Ponorogo dalam jangka menengah dengan jangka panjang.

4. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kab. Ponorogo

a. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai Tugas memimpin, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan serta pelaksanaan administrasi dibidang pariwisata dan seni budaya.

b. Bagian Tata Usaha.

1) Bagian tata saha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, surat menyurat, kearsipan, admnistrasi perijinan,

admisistarsi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga dinas.

- 2) Sebagai pengelola admonistarsi keungan dan gaji pegawai.
- 3) Pengelolaan dan penyelesaian administrasi perijinan.
- 4) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua unit organisasi dilingkungan Dinas pariwisata dan Seni budaya.
- 5) Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas pariwisata dan Seni budaya.

Bagian tata usaha terdiri dari 4 (empat) sub Bagian yang dipimpin olah seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian tata Usaha.

1. Sub Bagian Perencanaan.

- a) Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mempersiapkan pedoman, petunjuk teknis, dan melaksanakan penyusunan program.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian perencanaan mempunyai fungsi:
 1. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kegiatan dibidang Pariwisata dan seni budaya.
 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pariwisata dan seni budaya.

3. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pariwisata dan seni budaya.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha.

2. *Sub Bagian Umum.*

- a) Sub Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, keprotokolan, perlengkapan dan Hubungan masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat-menyurat, pengetikan, pengadaan dan tata usaha kearsipan.
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat Dinas.
 - c. Penghimpunan data dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan kantor.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan perawatan peralatan / perlengkapan kantor.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

3. *Sub Bagian Keuangan.*

- a) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan , menghimpun, menyusu anggaran belanja dan mengelola keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dinas.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bagian keuangan mempunyai fungsi:
 1. Penghimpun data dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan.
 2. pelaksanaan pengelolaan keungan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai.
 3. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
 4. pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

4. *Sub Bagian Kepegawaian.*

- a) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, peningkatan pelayanan pegawai, menghimpun dokumen serta menyelenggarakan evaluasi dan laporan kepegawaian.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:
 1. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai dan mutasi pegawai.

2. Penyusunan formasi dan perencanaan pegawai.
3. Pengelolaan administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai.
4. Pengurusan Kesejahteraan pegawai.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

c. Sub Dinas obyek dan Daya Tarik wisata

- a) Sub Dinas dan Daya Tarik wisata mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 1, sub dinas obyek dan Daya tarik Wisata mempunyai fungsi:
 1. Pembinaan dan Upaya pengembangan perusahaan obyek wisata dan rekreasi wisata.
 2. Pelayanan teknis perijinan dibidang perusahaan obyek wisata dan rekreasi wisata.
 3. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan obyek wisata dan rekreasi wisata
 4. penyusunan laporan pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi obyek Wisata.

- 1) Seksi Obyek dan daya tarik wisata mempunyai tugas melaksanakan mengumpulkan, menyiapkan bahan dan petunjuk obyek dan daya tarik wisata.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi obyek wisata mempunyai fungsi :
 1. Pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan obyek wisata dan daya tarik wisata.
 2. Penyiapan bahan pembinaan dan Upaya pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
 3. Penyiapan bahan untuk Pengembangan karya seni budaya Nasional sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dilokasi obyek wisata sesuai dengan etika dan estetika lingkungan kehidupan setempat.
 4. Penyiapan petunjuk tentang pembatasan semaksimal mungkin semua jenis serta unsur seni budaya asing yang berpengaruh negatif pada pembangunan bangsa dan negara.
 5. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan di bidang obyek wisata dan daya tarik wisata.
 6. Pelaksanaan pemantauan terhadap obyek wisata dan daya tarik wisata.

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Dinas

Obyek dan Daya Tarik Wisata

b. Seksi Rekreasi Wisata.

- 1) Seksi rekreasi wisata mempunyai tugas melaksanakan mengumpulkan dan menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemrosesan perijinan di bidang rekreasi wisata.
- 2) Untuk melaksanakan Tugas Sebagaimana dimaksud, Seksi Rekreasi wisata mempunyai fungsi :
 - a) Pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dibidang rekreasi wisata.
 - b) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan rekreasi wisata sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
 - c) penyiapan bahan penyusunan laporan dibidang rekreasi wisata.
 - d) pemrosesan perijinan dibidang rekreasi wisata.
 - e) Pelaksanaan pemantauan terhadap tempat rekreasi wisata.

d. Sub Dinas sarana dan Jasa Usaha wisata.

- a) Sub dinas sarana dan Jasa usaha Wisata.mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana wisata dan tenaga kerja wisata lingkungan pariwisata.
- b) Untuk melaksanakan Tugas Sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Sarana dan jasa usaha Wisat mempunyai fungsi :

1. Pembinaan dan Pengembangan sarana wisata dan tenaga kerja lingkungan pariwisata.
2. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pembinaan, pengembangan sarana wisata dan tenaga kerja pariwisata lingkungan pariwisata.
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

A . Seksi Akomodasi.

- a) Seksi akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan pembinaan, pemrosesan perijinan pelayanan jasa bagi wisatawan dibidang akomodasi dan jasa angkutan wisata, sarana tirta.
- b) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Seksi Akomodasi mempunyai fungsi :
 1. Pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dibidang akomodasi pelayanan jasa bagi wisatawan dan lingkungan bidang pariwisata.
 2. Penyiapan bahan pembinaan dan upaya pengembangan sarana-sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan jasa bagi wisatawan dibidang akomodasi, jasa angkutan wisata dan sarana tirta.
 3. Pemrosesan perijinan dibidang akomodasi jasa angkutan wisata dan sarana tirta.
 4. pelaksanaan pemantauan dibidang Akomodasi, jasa angkutan wisata dan sarana tirta.

5. Penyiapan dan penyusunan laporan dibidang akomodasi dan jasa angkutan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Dinas Sarana wisata.

5. Sub Dinas Pemasaran.

- a) Sub Dinas Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan, pembinaan, pengembangan, pemantauan, pemasaran, hubungan dan kerja sama wisata.
- b) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Sub Dinas pemasaran mempunyai fungsi :
 1. Pembinaan dan pengembangan Pemasaran serta hubungan kerjasama wisata.
 2. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pemasaran hubungan dan kerjasama wisata.
 3. Penyusunan analisa dan rencana pengembangan pasar wisata.
 4. Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.
 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

A. Seksi Promosi Wisata.

- a) Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan, menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan dibidang promosi wisata.
- b) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Seksi Promosi Wisata mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam pengadaan dan memajukan sarana promosi wisata.
2. Penyiapan bahan dalam upaya pengembangan pembangunan sarana promosi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pengumpulan dan penyusunan bahan laporan dibidang promosi wisata.
4. Penyiapan bahan promosi wisata untuk event-event regional, nasional dan internasional.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sub dinas pemasaran.

B. Seksi Pelayanan Informasi wisata.

- a. Seksi Pelayanan informasi wisata mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan pembinaan di bidang pelayanan informasi wisata.
- b. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud seksi pelayanan Informasi wisata mempunyai fungsi :
 1. Pengumpulan data-data dalam rangka pelayanan informasi kepariwisataan.
 2. Penyiapan bahan pembinaan sera kerja sama dengan instansi pemerintah / swasta dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepariwisataan.
 3. Pengelolaan dan penyelenggraan pusat informasi pariwisata.
 4. penyuisunan laporan tentang pelaksanaan pelayanan informasi.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas pemasaran

C. Seksi Hubungan dan kerjasama wisata.

- a. Seksi Hubungan dan kerjasama wisata mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan hubungan dan kerjasama wisata dibidang pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud seksi hubungan dan kerjasama wisata mempunyai fungsi :
 1. Pengumpulan bahan untuk pelaksanaan hubungan dan kerjasama wisata.
 2. Penyiapan srana hubungan dan kerjasama wisata bidang pariwisata.
 3. Perencanaan dan pelaksanaan peningkatan hubungan dan kerjasama wisata dalam rangka peningkatan kepariwisataan Daerah
 4. Penyusunan laporan tentang pelaksanaan hubungan dan kerjasama wisata.
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sub Dinas Pemasaran.

6. Sub Dinas Seni dan Budaya.

- a. Sub dinas Seni Budaya mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pemrosesan perijinan dan koordinasi dibidang seni budaya.
- b. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Sub Dinas Seni budaya mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pendataan kegiatan kesenian, sejarah, Nilai tradisional Museum dan Kepurbakalaan.
2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk memajukan kesenian serta melestarikan sejarah, nilai tradisional, museum dan benda-benda Kepurbakalaan.
3. Pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan Seni budaya
4. Penyusunan program dan laporan kegiatan seni budaya.

A. Seksi Kesenian.

- a. Seksi Kesenian mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan pembinaan koordinasi dalam penyelenggaraan kesenian
- b. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Seksi Kesenian mempunyai fungsi :
 1. Penghimpun, pengolahan dan pemeliharaan data kesenian dan kesenian kreasi baru.
 2. Pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan kesenian / kebudayaan masyarakat.
 3. Pelaksanaan koordinasi dengsn instansi terkait untuk peningkatan dan pengembangan kesenian / budaya.
 4. Pelaksanaan Nomorisasi kelembagaan kesenian dan pembinaan seniman daerah.
 5. Penyusunan laporan tentang kegiatan kebudayaan / kesenian di masyarakat.

B. Seksi Sejarah Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan.

- a. Seksi Sejarah Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan mempunyai tugas Pendataan, pembinaan, pemantauan dan koordinasi dalam rangka pengelolaan sejarah nilai Tradisional, museum dan keurbakalaan.
- b. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Seksi Sejarah Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan mempunyai tugas :
 1. Penggalan, pendataan dan pemeliharaan sejarah Seni Tradisional, Museum dan Kepurbakalaan.
 2. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pemanfaatan subsidi dan atau bantuan.
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lintas sektoral untuk penanganan dan pelestaria sejarah nilai tradisional, Museum dan peninggalan purbakala.
 4. Penyusunan laporan tentang penanganan dan pelestarian sejarah nilai tradisional, Museum dan peninggalan purbakala.

C. Seksi Atraksi dan Hiburan.

- a. Seksi Atraksi dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan mengumpulkan dan menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemrosesan perijinan dibidang rekreasi dan hiburan umum.
- b. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Seksi Atraksi dan Hiburan mempunyai fungsi :
 1. Mengumpulkan dan penyusunan bahan pembinaan dibidang atraksi dan hiburan umum.

2. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan atraksi dan hiburan umum sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
3. Pemrosesan perijinan dibidang atraksi dan hiburan umum.
4. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan atraksi dan hiburan umum sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
5. Pelaksanaan pemantauan terhadap atraksi dan hiburan umum.

7. Kelompok jabatan Fungsional.

- a. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pariwisata dan seni Budaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- c. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. DATA FOKUS PENELITIAN

1. Kondisi potensi Pariwisata kabupaten Ponorogo.

a. Potensi Obyek dan Daya tarik wisata.

Dari hasil observasi, secara umum pembangunan dan pengembangan bidang kepariwisataan Kabupaten Ponorogo menunjukkan kinerja yang baik, peningkatan jumlah obyek dan daya tarik wisata dan fasilitasnya yang memadai, peningkatan jumlah pengusaha pariwisata, peningkatan jumlah pengunjung / wisatawan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata. Keberhasilan ini didukung karena besarnya potensi alam dan Budaya yang dapat dijadikan modal bagi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Ponorogo, yang secara garis besar terdapat 4 (Empat) potensii pengembangan kepariwisataan yang ada di kabupaten Ponorogo yaitu:

1. Potensi wisata alam
2. Potensi wisata budaya
3. Potensi wisata religius
4. Potensi wisata buatan

Dari hasil wawancara, seperti yang diungkapkan Bp.Drs. Gunardi Msi selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo mengatakan :

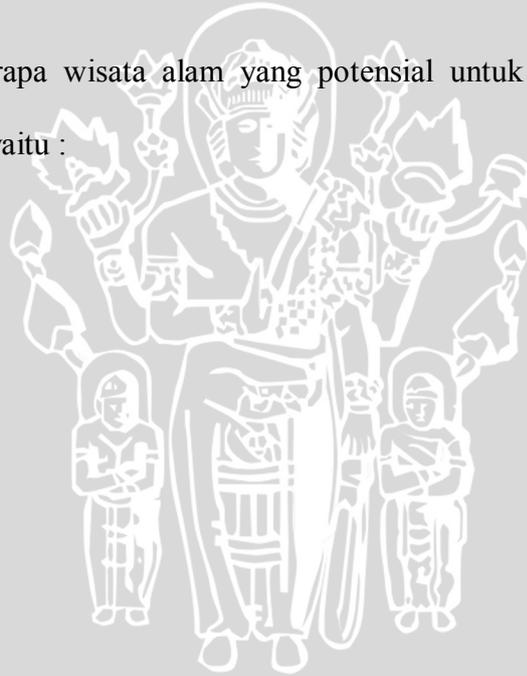
” Kabupaten Ponorogo mempunyai cukup banyak Obyek dan Daya Tarik Wisata dimana masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri yang dapat dinikmati oleh para wisatawan.namun demikian masih terdapat berbagai obyek yang belum dikelola secara optimal sehingga sarana dan prasarannya masih kurang memadai,namun perlu ditekankan disini bahwa meskipun pengelolaanya belum optimal, pemerintah daerah telah

berupaya untuk mengembangkan potensi Pariwisata yang ada termasuk pula menginventarisasi aset pariwisata yang ada serta berusaha melakukan promosi kepariwisataan". (20 April 2008, 09.00 WIB di kantor Dinas Pariwisata dan Seni budaya Kabupaten Ponorogo).

Berdasarkan sumber data yang diperoleh peneliti dari Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo, selanjutnya dapat dibedakan beraneka ragam jenis potensi pariwisata yang berada di kabupaten Ponorogo di kategorikan dalam 4 (empat) obyek dan daya tarik wisata sebagai berikut:

1.Potensi Wisata Alam

Terdapat beberapa wisata alam yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Ponorogo yaitu :



Tabel 5 : Potensi Wisata Alam di Kabupaten Ponorogo

No	Nama Obyek dan Daya Tarik Wisata	Pengelola (Swasta, Otorita, pemma)	Lokasi / Kecamatan
1	Telaga Ngebel	Din.Diparsenibud Kab. Ponorogo	Kecamatan Ngebel
2	Taman Wisata Ngembag	Din.Diparsenibud Kab. Ponorogo	Kecamatan Siman.
3	Mata Air Tanjung Sari	Desa	Ds. Tanjungsari Kec. Jenangan
4	Sumber Air panas	Desa	Ds. Talun Kec. Ngebel
5	Gunung Bayang kaki	Desa	Ds. Temon Kec. Sawoo
6	Air terjun Klenteng	Desa	Ds. Tumpuk Kec. Sawoo
7	Air terjun Grojogan coban	Desa	Ds.Tumpak pelem kec.Sawoo
8	Mata Air Beji	Desa	Ds. Bedingin Kec. Sambit
9	Sendang Bulus	Desa	Ds.pager Kec Bungkal
10	Goa pertapan	Desa	Ds. Munggu Kec Bungkal
11	Gunung Pringgitan	Desa	Ds. Slahung Kec. Slahung
12	Hutan wisata kucur	Perhutani	Ds. Briting Kec. Badegan
13	Goa Lawa	Desa	Ds. Sampung Kec Sampung
14	Air Terjun Widodaren	Desa	Ds. Bulu Lor Kec. Jambon
15	Gunung Loreng	Desa	Ds Slahung kec Slahung
16	Air Terjun Peletuk	Desa	Ds Jurug kec Sooko
17	Goa Ngor	Desa	Ds tumpuk kec. Sawoo
18	Taman Sooko sewu	Desa	Ds Sukorejo Kec. Sukorejo

Sumber:Dinas Pariwisata dan seni budaya Kab.Ponorogo

2. Wisata Budaya.

Tabel 6 : Potensi Wisata Budaya Kabupaten Ponorogo

No	Nama Obyek dan Daya Tarik Wisata	Pengelola (Swasta, Otorita, pemda)	Lokasi / Kecamatan
1	Pesta Rakyat Grebeg Suro	PEMDA	Kec Ponorogo
2	Taman Rekreasi Singo Pitu	PEMDA	Kec Ponorogo
3	Pentas Wayang Kulit	PEMDA	Alon-Alon Kab. Ponorogo
4	Reog Bulan Purnama	Diparsenibud Kab. Ponorogo	Alon-Alon Kab. Ponorogo
5	Festifal Reog mini	Diparsenibud Kab. Ponorogo	Aloon-Aloon Kab. Ponorogo
6	Peringatan hari jadi Kab. Ponorogo	PEMDA	Alon-Alon Kab. Ponorogo

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Ponorogo

3. Wisata Religius.

Tabel 7 : Potensi Wisata Religius kabupaten Ponorogo

No	Nama Obyek dan Daya Tarik Wisata	Pengelola (Swasta, Otorita, pemda)	Lokasi / Kecamatan
1	Ziarah Makam Bathoro Katong	Mukala	Kel Setono Kec. Jenangan
2	Ziarah Makam gondoloyo	Desa	Kel Setono Kec. Jenangan
3	Mata Air sendang Waloyo	Desa	Ds. Klepu Kec. Sooko
4	Masjid Tegalsari	Takmir Masjid	Ds Tegalsari Kec. Jetis

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Ponorogo

4. Wisata Buatan.

Tabel 8 : Potensi Wisata Buatan kabupaten Ponorogo

No	Nama Obyek dan Daya Tarik Wisata	Pengelola (Swasta, Otorita, pemda)	Lokasi / Kecamatan
1	Kolam Renang Tirto Menggolo	Swasta	Kel. Nologaten Kec. Ponorogo

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Ponorogo

5. Upaya Pengembangan.

Tabel 9 :Pembangunan fasilitas primer pada obyek wisata dan seni budaya Kabupaten Ponorogo 2005 / 2006

No	Nama obyek Wisata	Fasilitas yang dibangun
1	Wisata Alam Ngebel	Penambahan sarana prasarana hotel, Restoran, perbaikan jalan. Selain itu dalam pengembangan wisata obyek wisata ini akan dijadikan sebagai wisata Agrobisnis
2	Wisata Alam Ngembag	Penambahan pembangunan kolam renang dan taman wisata. Selain itu untuk menarik wisatawan perlu adanya penyelenggaraan hiburan tambahan pada musim liburan.
3	Wisata Seni Budaya Grebeg Suro	Upaya pembinaan dan pelestarian kesenian Reog Ponorogo yang dikemas dalam event- budaya daerah.
4	Kolam Renang Tirto menggolo	Penambahan pembangunan kolam renang dengan dilengkapi seluncur air dan akan dibangunnya sarana olahraga yang representatif.
5	Obyek wisata religi ziarah makam Bhatara katong	Pembangunan dilingkungan sekitar makam khususnya perombakan bangunan-bangunan lama dan pembangunan gapura jalan masuk ke obyek wisata.

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Ponorogo

Selain obyek Wisata seperti tersebut diatas, masih terdapat beberapa obyek dan Daya Tarik Wisata yang mempunyai potensi untuk dikembangkan antara lain: Goa Lawa, Beji Pager, Sendang Bulus, Goa Pertapan dsb. Tetapi karena keterbatasan Dana maka obyek wisata tersebut masih dikelola masyarakat setempat. Maka dari itu perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangannya dari beberapa obyek wisata yang masih tertinggal itu, adapun paket wisata dimaksud adalah penyelenggaraan hiburan tambahan bagi pengunjung beberapa obyek wisata yang belum mendapat perhatian dari pemerintah pada saat musim liburan.

b. Potensi Obyek Wisata dan Seni Budaya.

Dari begitu banyak potensi Obyek Wisata yang ada di kabupaten Ponorogo memprioritaskan pengembangan pada Obyek Wisata :

1. Wisata Danau Ngebel.

Sejarah Danau Ngebel

Telaga Ngebel mempunyai cerita unik yang didasarkan pada kisah seekor ular naga bernama "Baru Klinting". Sang Ular ketika bermeditasi secara tak sengaja dipotong-potong oleh masyarakat sekitar untuk dimakan. Secara ajaib sang ular menjelma menjadi anak kecil yang mendatangi masyarakat dan membuat sayembara, untuk mencabut lidi yang ditancapkan di tanah. Namun tak seorangpun berhasil mencabutnya. Lantas dia sendirilah yang berhasil mencabut lidi itu. Dari lubang bekas lidi tersebut keluarlah air yang kemudian menjadi mata air yang menggenang hingga membentuk Telaga Ngebel.

Legenda Telaga Ngebel, terkait erat dan memiliki peran penting dalam sejarah Kabupaten Ponorogo. Konon salah seorang pendiri Kabupaten ini yakni Batoro Kantong, sebelum melakukan syiar Islam di Kabupaten Ponorogo, Batoro menyucikan diri terlebih dahulu di mata air, yang ada di dekat Telaga Ngebel yang kini dikenal sebagai Kucur Batoro.

Wisata alam Danau Ngebel terletak di Kecamatan Ngebel kurang lebih 15 km dari pusat kota Ponorogo. Danau Ngebel selain di bangun dan digunakan untuk sebagai tempat Rekreasi / tempat wisata di bangun juga untuk penyediaan air untuk irigasi pertanian. wisata alam Telaga Ngebel dengan ketinggian 734 meter diatas permukaan laut dengan alam yang terbuka, serta ditunjang hasil pertanian khususnya Holtikultura seperti Durian, Alpokat, Nangka dan lainnya. dengan hamparan air yang indah dan luas dan pemandangan yang indah di alam perbukitan. Danau Ngebel ini merupakan salah satu tempat obyek wisata domestik yang berupa upacara adat penyelenggaraan Larungan Grebeg Suro yang diselenggarakan setiap tahun sekali pada bulan Suro. Dari observasi peneliti, fasilitas obyek Wisata Danau Ngebel antara lain :

- ~ Arena memancing.
- ~ Wisata air dengan perahunya.
- ~ gardu pandang yang dilengkapi dengan Taman.
- ~ Warung makan dan minuman disekitar Danau.
- ~ dan lebih eksotis lagi obyek wisata ini bisa dikatakan sebagai wisata Agrobisnis yang mana penghasil buah dan sayuran.

2. Wisata Ngembag.

Wisata alam Ngembag merupakan sebuah wisata alam yang didalamnya Kolam Renang dan taman. Obyek wisata ini terletak Kurang lebih 7 km kearah timur dari kota ponorogo. Dari observasi peneliti, fasilitas yang terdapat di obyek Wisata Ngembag ini adalah :

- ~ Pemandian buatan / kolam renang dewasa dan anak-anak.
- ~ kolam ikan.
- ~ Pertamanan.
- ~ Flora dan Fauna.
- Warung makan dan minuman disekitar wisata.

3. Hutan Wisata Kucur.

Obyek Wisata ini terletak di kecamatan Badegan berjarak kurang lebih 20 Km ke barat dari kota Ponorogo. Obyek wisata ini merupakan obyek wisata alam yang berupa hutan ditumbuhi banyak pohon jati. Biasanya obyek wisata ini dipergunakan sebagai tempat berkemah karena tersedianya arena perkemahan yang cukup luas dan nyaman. Kawasan wisata kucur ini dikelola oleh Perhutani sehingga terjaga dengan baik.

4. Obyek Wisata Gunung Pringgitan.

Obyek wisata Gunung Pringgitan ii terletak di kecamatan Slahung berjarak kurang lebih 25 km keselatan dari kota Ponorogo. Obyek wisata ini merupakan obyek wisata alam pegunungan yang banyak ditumbuhi pohon pinus. Dari tempat ini kita dapat melihat pemandangan alam pegunungan yang indah dan jauh

kebawah terlihat sawah-sawah hijau yang membentang dari rumah-rumah penduduk. Adapun fasilitas obyek wisata Gunung Pringgitan ini antara lain:

- ~ Gardu peristirahatan untuk para pengunjung.
- ~ Pertamanan.
- ~ Warung makan dan minuman.

5. Obyek Wisata Air Terjun Grojogan Coban.

Obyek wisata ini terletak di kecamatan Sawoo 15 km sebelah timur dari kota ponorogo. Dengan nuansa pegunungan yang terasa sejuk dan rimbunan pohon yang masih alami membuat air terjun sebagai tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Disamping itu tempat wisata ini sungguh cocok untuk bersantai dan melepas lelah dengan menikmati gemerciknya air terjun. Dalam pengembangan dan pengelolaanya masih dilakukan oleh masyarakat setempat.

6. Obyek Wisata Religi Ziarah Makam Bhatara Katong.

Obyek wisata ini terletak di kecamatan Jenangan yang mana lokasinya 3 km dari kota Ponorogo. Bhatara Katong adalah merupakan seorang pendiri babad Ponorogo yang mana menjadikan kota ponorogo sebagai kabupaten yang mana sebelumnya berbentuk kadipaten. Selain adanya makam Bhatara Katong banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah dilingkungan makam ini.

7. Obyek Wisata Buatan Kolam Renang Tirto Menggolo.

Obyek wisata ini terletak di kota Ponorogo berlokasi di jl. Pramuka .yang mana sebagai obyek wisata buatan dan banyak pengunjung untuk menikmati

olahraga renang baik orang dewasa maupun pelajar.dalam pengembangan serta pengelolaanya dilakukan pemerintah bersama pihak swasta. Dalam pembangunan dan pengembangan lebih mengarahkan dengan menambah sarana olahraga khususnya renang dan selalu menjaga kebersihan obyek wisata buatan ini.

c. Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya

1. Kesenian Tradisional Reog Ponorogo

Sejarah Reog Ponorogo

Berdasarkan observasi peneliti, pada dasarnya ada lima versi cerita populer yang berkembang di masyarakat tentang asal-usul Reog dan Warok, namun salah satu cerita yang paling terkenal adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan pada masa Bra Kertabumi, Raja Majapahit terakhir yang berkuasa pada abad ke-15. Ki Ageng Kutu murka akan pengaruh kuat dari pihak rekan Cina rajanya dalam pemerintahan dan perilaku raja yang korup, ia pun melihat bahwa kekuasaan Kerajaan Majapahit akan berakhir. Ia lalu meninggalkan sang raja dan mendirikan perguruan dimana ia mengajar anak-anak muda seni bela diri, ilmu kekebalan diri, dan ilmu kesempurnaan dengan harapan bahwa anak-anak muda ini akan menjadi bibit dari kebangkitan lagi kerajaan Majapahit kelak. Sadar bahwa pasukannya terlalu kecil untuk melawan pasukan kerajaan maka pesan politis Ki Ageng Kutu disampaikan melalui pertunjukan seni Reog, yang merupakan "sindiran" kepada Raja Bra Kertabumi dan kerajaannya. Pagelaran Reog menjadi cara Ki Ageng Kutu membangun perlawanan masyarakat lokal menggunakan kepopuleran Reog.

Dalam pertunjukan Reog ditampilkan topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai "Singa Barong", raja hutan, yang menjadi simbol untuk Kertabumi, dan di atasnya ditancapkan bulu-bulu merak hingga menyerupai kipas raksasa yang menyimbolkan pengaruh kuat para rekan Cinanya yang mengatur dari atas segala gerak-geriknya. Jatilan, yang diperankan oleh kelompok penari gemblak yang menunggangi kuda-kudaan menjadi simbol kekuatan pasukan Kerajaan Majapahit yang menjadi perbandingan kontras dengan kekuatan warok, yang berada dibalik topeng badut merah yang menjadi simbol untuk Ki Ageng Kutu, sendirian dan menopang berat topeng singabarong yang mencapai lebih dari 50kg hanya dengan menggunakan giginya. Populernya Reog Ki Ageng Kutu akhirnya menyebabkan Kertabumi mengambil tindakan dan menyerang perguruannya, pemberontakan oleh warok dengan cepat diatasi, dan perguruan dilarang untuk melanjutkan pengajaran akan warok. Namun murid-murid Ki Ageng kutu tetap melanjutkannya secara diam-diam. Walaupun begitu, kesenian Reognya sendiri masih diperbolehkan untuk dipentaskan karena sudah menjadi pertunjukan populer diantara masyarakat, namun jalan ceritanya memiliki alur baru dimana ditambahkan karakter-karakter dari cerita rakyat Ponorogo yaitu Kelono Sewondono, Dewi Songgolangit, and Sri Genthayu.

Versi resmi alur cerita Reog Ponorogo kini adalah cerita tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar putri Kediri, Dewi Ragil Kuning, namun ditengah perjalanan ia dicegat oleh Raja Singabarong dari Kediri. Pasukan Raja Singabarong terdiri dari merak dan singa, sedangkan dari pihak Kerajaan Ponorogo Raja Kelono dan Wakilnya Bujanganom, dikawal oleh warok (pria berpakaian hitam-hitam dalam tariannya), dan warok ini memiliki ilmu hitam

mematikan. Seluruh tariannya merupakan tarian perang antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Ponorogo, dan mengadu ilmu hitam antara keduanya, para penari dalam keadaan 'kerasukan' saat mementaskan tariannya.

Hingga kini masyarakat Ponorogo hanya mengikuti apa yang menjadi warisan leluhur mereka sebagai pewarisan budaya yang sangat kaya. Dalam pengalamannya Seni Reog merupakan cipta kreasi manusia yang terbentuk adanya aliran kepercayaan yang ada secara turun temurun dan terjaga. Upacaranya pun menggunakan syarat-syarat yang tidak mudah bagi orang awam untuk memenuhinya tanpa adanya garis keturunan yang jelas. mereka menganut garis keturunan Parental dan hukum adat yang masih berlaku.

Format Seni Tari REOG Ponorogo.

Dalam Daya tarik wisata budaya Kabupaen Ponorogo sangat terkenal dengan adanya kesenian REOG Ponorogo yang mana sebagai kesenian budaya tradisional. Kesenian ini lahir dan berkembang di Ponorogo. Dengan adanya Event-event seperti Festifal Reog Nasional dan pentas Reog setiap malam bulan purnama diharapkan dapat menarik minat wisatawan. Dalam satu group terdiri dari beberapa penari dan peabuh gamelan. Penari dalam group Reog antara lain Warok, Jathil, Bujang Ganong, Kelono Sewandono, dan Dadak merak.

Warok adalah Tokoh masyarakat yang disegani, dihormati, berwibawa dan berpengaruh dalam masyarakat. Seorang warok digambarkan sebagai figur yang tangguh. Warok memakai pakaian hitam-hitam dengan kolor berwarna putih, panjang yang terurai ujungnya.

Jathil menggambarkan sebagai prajurit berkuda, mereka bermakeup setengah feminin dan setengah maskulin.gerakan mereka sederhana, tetapi anggun dan bisa menunjukkan perpaduan antara budaya pedesaan dan kerajaan.

Bujang Ganong adalah tarian yang menggambarkan seorang patih, dia berwajah buruk berwarna merah dan rambutnya panjang.Tari Bujang Ganong gerakannya Dinamis, jenaka dan akrobatik.

Kelono Sewandono adalah Tari yang menggambarkan seorang raja kerajaan bantar angin, berwajah tampan. Raja kelono Sewandono mempunyai senjata yang berupa cambuk dengan nama pecut samandiman.Tari Kelono Sewandono gerakanya sangat tenagng, anggun dan berwibawa.

Dhadak Merak adalah tarian yang menggambarkan figur Raja Lodaya, Singo Barong. Dhadak Merak dibuat dari bulu burung merak dan kepala Harimau. Topeng ini beratnya mencapai 50 kg. Gerakanya harmonis dan selaras, harimau buas dan burung merak melambangkan kedamaian, kehidupan yang rukun, bahu membahu.

Kesenian Reog diiringi beberapa gamelan yang bernafaskan lain dari gamelan jawa pada umumnya. Gamelan dalam kesenian ini adalah perwujudan dari cipta kreasi seniman handal pada jamanya yaitu pujangga anom. Nilai falsafah gamelan Reog antara lain laras (nada) slendro yang terdapat pada gong dan laras pelog yang terdapat pada terompet merupakan simbol bersatunya kembali syailendra wangsa dengan sanjaya wangsa. Selain itu gamelan Reog juga merupakan satuan jelmaan benda-benda keraton dengan benda-benda yang terdapat dalam masyarakat pedesaan. Sehingga nuansa gamelan ini dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

2. Pertunjukan Reog Ponorogo.

a). Festifal Reog Nasional.

Festifal Reog Nasional diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten ponorogo setiap bulan Suro (kalender jawa) di panggung utama Alon-alon Ponorogo. Peserta FRN adalah seluruh daerah di Indonesia.

b). Festifal Reog mini.

Festifal Reog mini diselenggarakan oleh pemmerintah kabupaten ponorogo setiap bulan agustus di panggung utama aloon-aloon ponorogo. Peserta festifal Reog mini adalah siswa SD dan SLTP se kabupaten ponorogo. Acara ini juga dilaksanakan bersamaan dengan Ulang Tahun Kabupaten Ponorogo.

c). Bulan Purnama.

Festifal Reog bulan purnama ini dilaksanakan setiap bulan purnama mulai pukul 19.30 hingga selesai. Pertunjukan ini diselenggarakan di panggung utama Alon-alon ponorogo

Dari hasil wawancara dengan dinas yang terkait, dalam hal ini menurut Bp. Dwi Santoso, staff Dinas Pariwisata dan seni budaya kabupaten ponorogo berpendapat :

“ Dalam mengembangkan kesenian Reog Maka langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka memelihara dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Seni Reog telah ditempuh diantaranya pembangunan Padepokan Reog Ponorogo, Monumen Reog Ponorogo pada perempatan jalan-jalan protocol dan pembangunan panggung utama di alon-aloon ponorogo yang digunakan sebagai pusat penyelenggaraan Festifal Reog Nasional dan event-event budaya lainnya.” (Selasa; 20 April 2008, 08.00 WIB di kantor Diparsenibud kabupaten Ponorogo)

Berkenaan dengan uraian diatas, maka jelaslah betapa pentingnya upaya untuk meningkatkan, melestarikan dan mempromosikan Seni Budaya tradisional Reog dalam rangka menumbuhkan kembali kecintaan terhadap Reog juga untuk mewujudkan Ponorogo sebagai kota Reog dan tujuan wisata.

3) *Pentas Wayang kulit.*

Wayang kulit merupakan seni Tradisional yang sangat gemari oleh masyarakat Ponorogo. Untuk menarik penggemar seni Tradisional wayang pada pagelarannya sudah mulai dikembangkan dengan banyaknya kreasi-kreasi baru maupun penampilan yang lebih segar dan memberikan pesona tersendiri bagi pengunjung yang menikmati. Kesenian ini diselenggarakan disetiap kecamatan dan secara bergiliran dalam 2 bulan sekali.

4) *Grebeg Suro.*

Sebagai sebuah event wisata yang berakar dari tradisi masyarakat, Grebeg Suro telah menjadi event wisata yang matang, antusiasme dan peran aktif dari berbagai pihak telah memberi kesan yang lebih semarak dan menarik tiap kali penyelenggaraanya. Harus di akui bahwa masih ada beberapa kekurangan disana sini yang harus kita perbaiki, namun harus di akui pula event ini telah menjadi salah satu dari tiga event budaya terbesar yang digelar di Jawa Timur .

Berdasarkan hasil observasi, penyelenggaraan Grebeg Suro dan Festival Reog Nasional ini dikandung maksud disamping sebagai suatu wadah tradisi masyarakat dalam merayakan Tahun Baru Islam/Jawa 1 Suro dan upaya pelestarian kesenian tradisional juga sebagai usaha nyata Pemerintah Kabupaten

Ponorogo bersama-sama komponen masyarakat Ponorogo untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Melestarikan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa, Pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.
2. Sebagai upaya promosi dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata baik wisata alam, budaya dan religius di Kabupaten Ponorogo.
3. Merupakan sarana pengembangan kreativitas dan gairah seniman / budayawan serta masyarakat luas sehingga dapat menambah khasanah budaya bangsa.
4. Sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata.

Berikut dibawah ini kegiatan-kegiatan yang ada dalam rangkaian Event

Grebeg Suro :

- a. Simaan Al-qur'an, Tahlil Akbar dan Tabliq Akbar
- b. Mushabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)
- c. Lomba Samroh & Hadroh
- d. Upacara Pembukaan Grebeg Suro
- e. Pameran Industri Kecil
- f. Pameran Lukisan, Adenium dan Bonsai
- g. Pemilihan Duta Wisata Kakang Senduk
- h. Fashion Show dan Genduk Thole
- i. Festival Reog Nasional
- j. Pentas Seni Tradisional (Teater, Kethoprak dan Sendratari)

- k. Lomba Karawitan
- l. Wayang Kulit
- m. Festival Musik
- n. Kirab Pusaka, Lintas Sejarah dan Pesona Wisata, Pawai Kendaraan Antik
- o. Pentas Dangdut
- p. Upacara Penutupan Grebeg Suro
- q. Larungan Risalah Doa

Mengingat bahwa sektor pariwisata khususnya Grebeg Suro merupakan sektor potensial dan salah satu sektor dalam usaha pembangunan daerah. Maka perlu adanya pembinaan dan pengembangan yang lebih terarah dan terpadu. Untuk itu peran dari berbagai pihak sangat diperlukan khususnya pemerintah daerah.

Dari berbagai uraian diatas dalam pelestarian seni budaya Reog ponorogo juga mengalami kendala. Berdasarkan UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistem dan berdasarkan peraturan pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang satwa liar yang dilindungi. Maka berarti menangkap, menjual, atau memiliki satwa yang dilindungi merupakan tindakan yang ilegal.

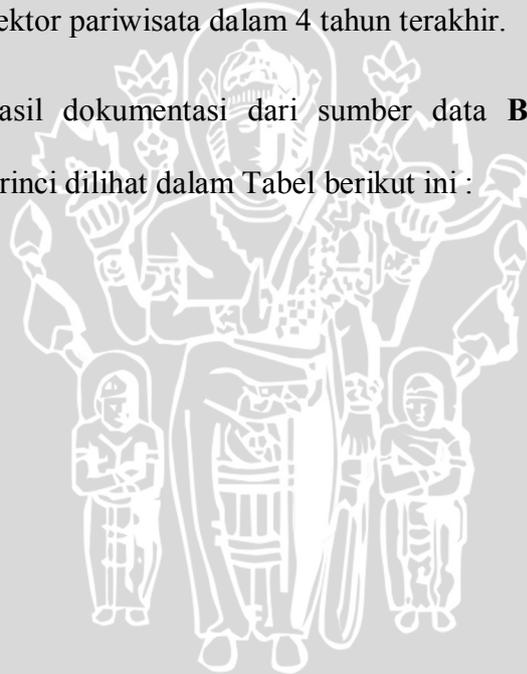
Sedangkan bahwa utama pembuatan perlengkapan Reog berupa Barongan adalah kepala Harimau dan Bulu Merak. Dan hewan-hewan tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh negara karena merupakan hewan yang berada diambang kepunahan. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, maka pemerintah daerah pernah mengganti bulu merak diganti dengan bulu angsa tetapi hasilnya tidak begitu maksimal. Maka dari itu perlu kerjasama antar pemerintah dan swasta agar ikut serta dalam pelestarian seni budaya daerah.

2. Pendayagunaan Potensi Wisata di Kabupaten Ponorogo di lihat dari Pendapatan Asli Daerah

a. Pendapatan Daerah Dari Sektor Wisata Seni Budaya.

Seperti di jelaskan sebelumnya bahwa sektor pariwisata memiliki pengaruh dalam meningkatkan PAD khususnya bagi masyarakat daerah. Selanjutnya akan diuraikan berapa besar kontribusi yang di berikan sektor pariwisata terhadap PAD setelah dilakukan pengembangan oleh Dinas pariwisata dan Seni Budaya. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pendapatan dari sektor Wisata dan Seni Budaya kabupaten Ponorogo terlebih dahulu disajikan besarnya pendapatan sektor pariwisata dalam 4 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil dokumentasi dari sumber data **BPKD Kabupaten Ponorogo** secara terperinci dilihat dalam Tabel berikut ini :



**Tabel : 3 Tabel Pendapatan Daerah dari sektor Wisata dan Seni Budaya
Kabupaten Ponorogo 2003 / 2006**

N o	Tahun	Jenis pendapatan sektor pariwisata	Target	Realisasi	Prosen tase
1	2003	a. Pajak	4,168,465,000.00	4,709,240,516.00	112.97
		- Pajak hotel	46,645,300.00	46,647,200.00	100.00
		- Pajak restoran	163,354,700.00	164,650,448.00	100.79
		- Pajak hiburan	105,000,000.00	108,755,000.00	103.58
		- Pajak reklame	250,000,000.00	256,791,525.00	102.72
		b. Retribusi	8,777,536,000.00	9,590,120,753.34	109.26
		- Ret.tempat rekreasi & olahraga	85,000,000.00	82,406,000.00	96.95
		- Ret.ijin usaha wisata	5,000,000.00	5.000.000.00	100.00
		Jumlah	655,000,000.00	664,250,173.00	101.42
2	2004	a. Pajak	5,175,875,000.00	5,458,123,285.96.	105.45
		- Pajak hotel	53,500,000.00	59,535,100.00	111.28
		- Pajak restoran	187,425,000.00	299,923,523.00	160.02
		- Pajak hiburan	120,750,000.00	102,938,300.00	85.25
		- Pajak reklame	300,000,000.00	311,526,375.00	103.84
		b. Retribusi	17,187,671,100.00	17,162,266,500.00	99.85
		- Ret.tempat rekreasi & olahraga	89,125,000.00	91,257,830.00	102.39
		- Ret.ijin usaha wisata	5,000,000.00	5.000.000.00	100.00
		Jumlah	755,800,000.00	870,181,128.00	115.14
3	2005	a. Pajak	5,820,195,000.00	5,998,985,386.11	103.07
		- Pajak hotel	61,680,000.00	66,641,200.00	108.04
		- Pajak restoran	216,000,000.00	383,595,209.00	177.59
		- Pajak hiburan	127,995,000.00	132,530,050.00	103.54
		- Pajak reklame	340,000,000.00	340,279,425.00	100.08
		b. Retribusi	18,136,715,000.00	18,891,886,186.17	104.16
		- Ret.tempat rekreasi dan olahraga	94,500,000.00	88,600,000.00	95.05
		- Ret.ijin usaha wisata	5,000,000.00	5.200.000.00	104.00
		Jumlah	845,175,000.00	1,016,845,884.00	120.32
4	2006	a. Pajak	6,136,842,000.00	6,661,140,389.68	108.54
		- Pajak hotel	64,370,000.00	71,101,566.00	104.46
		- Pajak restoran	246,022,000.00	603,211,150.00	245.19
		- Pajak hiburan	132,700,000.00	134,447,500.00	101.32
		- Pajak reklame	365,000,000.00	537,585,215.00	147.28
		b. Retribusi	19,182,761,800.00	21,522,323,160.92	112.20
		- Ret.tempat rekreasi dan olahraga	94,500,000.00	90,700,000.00	95.98
		- Ret.ijin usaha wisata	5,000,000.00	8,450,000.00	169.00
		Jumlah	907,592,000.00	1,445,495,431.00	159.26
		Total	3,163,567,000.00	3,996,772,616.00	126.34

Sumber : Data sekunder BPKD Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah kabupaten Ponorogo diperoleh dari beberapa jenis pendapatan yang menjadi urusan di bidang Pariwisata antara lain: Pajak hotel, pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi ijin usaha Kepariwisataaan. jumlah pendapatan sektor Wisata dan Seni budaya di kabupaten Ponorogo sangat besar, Dan tiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2003 pendapatan yang dihasilkan sebesar 101.42 % dan tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 115.14 % dan kemudian pada tahun 2005 sebesar 120.32 % serta pada tahun 2006 Meningkat sebesar 159.26 %. Dan total Pendapatan dari sektor pariwisata selama 4 tahun terakhir sebesar 126.34 %.

Selanjutnya peneliti sajikan sumberdata dari BPKD Kabupaten Ponorogo tentang kontribusi yang diberikan sektor wisata dan seni budaya terhadap PAD keseluruhan kabupaten Ponorogo Tahun 2003 /2006.

Tabel. 4 Kontribusi Sektor Wisata dan Seni budaya terhadap PAD Kabupaten Ponorogo Tahun anggaran 2003 / 2006.

No	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Wisata dan Seni Budaya (Rp)	Prosentase %
1	2003	23,873,498,059.00	664,250,173.00	2.78
2	2004	24,579,703,082.27	870,181,128.00	3.54
3	2005	28,279,449,793.43	1,016,845,884.00	3.61
4	2006	35,398,902,087.39	1,445,495,431.00.	4.09
	jumlah	1,121,315,530,000.00	4,314,842,112.00	38.5

Sumber : Data Sekunder BPKD kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan dari sektor wisata seni budaya terhadap PAD keseluruhan di Kabupaten ponorogo pada pada Tahun 2003 sebesar 2.78 %.dan pada tahun 2004 3.54 %. Sedangkan pada tahun 2005 sebesar 3.61% dan tahun 2006 sebesar 4.09%. Total pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD kabupaten ponorogo selama 4(Empat) tahun terakhir sebesar 38.5 % . dalam hal ini besarnya penerimaan pendapatan dari sektor wisata dan seni budaya sudah mulai meningkat . Untuk itu perlu perhatian yang serius dari pemerintah agar pendapatan sektor pariwisata dalam setiap tahunnya lebih ditingkatkan lagi.

b. Kontribusi Sektor Wisata dan Seni Budaya terhadap PAD

Untuk mengetahui kontribusi Pendapatan dari sektor Wisata dan Seni budaya kabupaten Ponorogo terlebih dulu jumlah Pedapatan Asli Daerah setiap tahunnya selama 4 (Empat) tahun terakhir yang terealisasi yaitu tahun 2003 sebesar 103.62 %, kemudian tahun 2004 sebesar 101.57 %, tahun 2005 sebesar 109.10 % dan tahun 2006 sebesar 117.05 %. Dan total pendapatan selama empat Tahun terkhir sebesar 108.44 %.

Sedangkan jumlah pendapatan sektor Wisata dan Seni budaya di kabupaten ponorogo sangat besar, Dan tiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2003 pendapatan yang dihasilkan sebesar 101.42 % dan tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 115.14 % dan kemudian pada tahun 2005 sebesar 120.32 % serta pada tahun 2006 Meningkat sebesar 159.26 %. Dan total Pendapatan dari sektor pariwisata selama 4 tahun terakhir sebesar 126.34 %.

Selanjutnya, berdasarkan sumberdata dari BPKD Kabupaten Ponorogo peneliti sajikan kontribusi yang diberikan sektor wisata dan seni budaya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2003 2.78 % Tahun 2004 3.54% Tahun 2005 3.61% dan tahun 2006 4.09 % terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Total keseluruhan selama empat tahun terakhir sebesar 38.5 %

Apabila diamati tentang perolehan PAD selama kurun waktu 4 (Empat) tahun terakhir terlihat menunjukkan kecenderungan peningkatan. tetapi dari hasil penelitian kontribusi yang diberikan dari sektor wisata seni budaya masih kecil.maka untuk itu perlu peningkatan dari kontribusi wisata terhadap PAD ponorogo ini dengan melakukan langkah-langkah untuk lebih meningkatkan kontribusi wisata seni budaya terhadap PAD Kabupaten ponorogo. Ini dikarenakan dari sekian banyaknya obyek wisata yang ada hanya ada 3 obyek wisata yang dapat memberikan kontribusi dalam menunjang PAD.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sektor wisata dan seni budaya merupakan sektor yang memiliki pengaruh yang cukup menjanjikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo, meskipun selama ini banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan sektor wisata ini.

D. Upaya Pemberdayaan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Terwujudnya daerah otonom dengan asas Desentralisasi yang mana dalam hal tersebut Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan sektor wisata dan seni budaya khususnya, memiliki fungsi dan peranan untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi daerahnya.

Mengingat bahwa sektor Wisata Seni Budaya merupakan sektor potensial dan salah satu sektor andalan dalam usaha pembangunan daerah, Maka perlu adanya pembinaan dan pengembangan yang lebih terarah dan terpadu. Untuk itu peran dari berbagai pihak sangat diperlukan khususnya pemerintah daerah yang terkait dengan usaha pengembangan wisata dan seni budaya.

Maka langkah-langkah yang diambil dalam upaya pemberdayaan potensi pariwisata kabupaten Ponorogo, mencakup antara lain:

1. Menciptakan dan menggerakkan iklim investasi bidang Wisata dan Seni Budaya seperti usaha kawasan wisata, usaha sarana wisata tirta, usaha jasa informasi dan konsultan pariwisata;
2. Meningkatkan dan menumbuhkan kembali potensi wisata dan Seni Budaya yang telah berkembang, bersumber pada potensi yang belum berkembang dan bersumber pada potensi alam dan budaya yang berwawasan lingkungan serta pelestarian budaya;
3. Meningkatkan kuantitas dan varitas potensi unggulan Wisata dan seni Budaya dan diversifikasi produk pelayanan wisata dan Seni Budaya yang standar, berdaya saing, memenuhi rasa aman dan nyaman serta tercipta ragam koridor wisata dan Seni budaya di Ponorogo;
5. Diversifikasi dan peningkatan mutu produk usaha jasa-jasa wisata dan Seni Budaya untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga memiliki daya saing dan mampu berperan secara aktif dalam mengantisipasi era global;
6. Memberdayakan pengembangan pemasaran wisata dan Seni Budaya terpadu dalam dan luar negeri agar tepat sasaran dan efisiensi serta

menggalang peran serta masyarakat dengan cara memposisikan masyarakat sebagai subyek pengembangan Wisata dan Seni Budaya, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha wisata dan seni budaya yang kooperatif dan dinamis;

7. Meningkatkan kualitas SDM wisata dan seni budaya yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan yang memiliki standarisasi, sertifikasi, akreditasi dan rekognasi;
8. Memposisikan masyarakat sebagai pelaku langsung dalam kegiatan usaha wisata seni budaya melalui peggalangan bentuk-bentuk kemitraan usaha antar skala mikro kecil-menengah dengan skala besar (PIR) serta menempatkan sektor ekonomi kerakyatan dalam pengembangan pariwisata.

Pemerintah kabupaten Ponorogo sendiri telah memiliki beberapa potensi sektor wisata dan seni budaya. diantaranya meliputi Wisata Alam, Wisata budaya, Wisata Religi, Wisata Buatan. Dari sekian banyak potensi wisata yang ada kesemuanya sudah dikelola dan ditangani dengan baik oleh pemerintah kabupaten ponorogo, dalam hal ini sebagai pelaksananya adalah Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo.

Dari berbagai potensi wisata selain bertujuan melestarikan seni budaya juga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo. Selain itu untuk membuat Ponorogo sebagai tempat wisata ini dituntut adanya keterlibatan semua pihak, selain pemerintah sendiri, pihak swasta Event Organizer serta perlu juga partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Mengingat bahwa sektor pariwisata merupakan sektor potensial dan salah satu sektor dalam usaha pembangunan daerah. Maka perlu adanya pembinaan dan pengembangan yang lebih terarah dan terpadu. Untuk itu peran dari berbagai pihak sangat diperlukan khususnya pemerintah daerah kabupaten Ponorogo yang terkait dengan usaha pengembangan wisata dan seni budaya tersebut. .

Dalam hal ini, berdasarkan observasi peneliti Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mengupayakan berbagai jenis pengembangan sektor wisata dan Seni Budaya antara lain.

1. Peningkatan Pemasaran dan Promosi wisata Seni budaya.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Bp. Bambang Wibisono, S.sn menyatakan :

” Kabupaten Ponorogo dalam Peningkatan pengembangan pemasaran dan promosi wisata seni budaya dengan meningkatkan aktifitas wisata dan seni budaya harus disertai dengan usaha-usaha penyebar luasan atau pengenalan melalui pemasangan gambar-gambar atau poster-poster di tempat umum. Selain itu kegiatan periklanan atau promosi harus didukung dengan penyedia sarana dan prasarana transportasi, keamanan, akomodasi dan komunikasi sehingga jumlah kenaikan wisatawan tidak menimbulkan masalah dan sudah disisipkan sebelumnya. *(22 April 2008 09.00Wib di dinas pariwisata dan seni budaya Ponorogo)*

Dari data hasil observasi, dalam mewujudkan pemasaran dan promosi wisata seni budaya langkah-langkah yang dilakukan kabupaten ponorogo adalah :

- a. Penyebarluasan leaflet, pamflet atau pouldar, baik dalakukan oleh pemerintah maupun swasta.

- b. Pembuatan kalender yang bergambar obyek-obyek dan daya tarik wisata di kabupaten ponorogo, baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.
- c. Penampilan beberapa obyek dan daya tarik wisata dilayar televisi.
- d. Penerbitan buku-buku panduan wisata kabupaten ponorogo.
- e. Buku-buku yang memuat gambar uraian obyek dan daya tarik wisata kabupaten ponorogo.

Adapun dalam melakukan usaha promosi diatas yang menjadi pedoman adalah dalam rangka menarik minat wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah khususnya obyek wisata.berdasarkan pengamatan peneliti kegiatan pemasaran dan promosi yang dilakukan selama ini hanya terbatas dalam negeri saja. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana dan apabila dilihat dari sarana jalan menuju obyek wisata belum memenuhi standar kelayakan sebab jalanya sangat sempit sehingga untuk jalan bus besar sangat kesulitan. Hal inilah yang menjadikan promosi yang dilakukna hanya sebatas dalam negeri saja.

2. Upaya Pemberdayaan Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Dari hasil wawancara oleh peneliti, menurut pendapat Bp. Tony Hendratmoko SH Kasubdin obyek dan daya tarik wisata kabupaten ponorogo menyatakan :

“Dalam pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Ponorogo tidak dapat berjalan dengan sukses apabila tidak disertai dengan obyek wisata yang memiliki daya Tarik tersendiri di bandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu diperlukan pengembangan terhadap Obyek dan Daya Tarik Wisata. (Kamis 8 Februari 2007 10.00 WIB di dinas pariwisata dan seni budaya Ponorogo)

Dalam mewujudkan pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata langkah –langkah yang diambil pemerintah kabupaten Ponorogo adalah :

- a. Meningkatkan dan menumbuhkan kembali potensi Wisata dan Seni budaya yang telah berkembang, bersumber pada potensi yang belum berkembang dan bersumber pada potensi alam dan budaya yang berwawasan lingkungan serta pelestarian budaya.
- b. Meningkatkan kuantitas dan varitas potensi unggulan wisata dan seni budaya dan diversifikasi produk pelayanan wisata dan seni budaya yang standar, berdaya saing, memenuhi rasa aman dan nyaman serta tercipta ragam koridor pariwisata diponorogo.
- c. Menciptakan dan menggerakkan iklim investasi bidang wisata dan seni budaya seperti usaha kawasan pariwisata, usaha sarana wisata tirta, usaha jasa informasi dan konsultan pariwisata.
- d. Diversifikasi dan peningkatan mutu produk usaha jasa-jasa wisata dan seni budaya untuk memenuhi standar Nasional Indonesia sehingga memiliki daya saing dan mampu berperan secara aktif dalam mengantisipasi era global.
- e. Memposisikan masyarakat sebagai pelaku langsung dalam kegiatan usaha wisata dan seni budaya melalui penggalangan bentuk-bentuk kemitraan usaha antar skala kecil- menengah dengan skala besar serta menempatkan sektor ekonomi kerakyatan dalam pengembangan pariwisata.

Berdasarkan hasil observasi, sesuai dengan teori diatas, ternyata apabila dikaitkan dengan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Obyek dan Daya Tarik Wisata, akan tetapi

pengembangan tersebut belum terlaksana dengan baik sesuai program yang ditetapkan, mengingat adanya keterbatasan dana yang tersedia. Sehingga dalam pengembangan daya tarik wisata tersebut perlu ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Ponorogo.

3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Didalam rangka mengembangkan potensi wisata kabupaten Ponorogo pemerintah melakukan pengembangan diantaranya dengan mengembangkan sarana dan prasarana wisata. Layak dan tidaknya suatu daerah sebagai daerah tujuan wisata sangat di tentukan oleh keadaan dan tersedianya sarana dan prasarana wisata dan seni budaya yang bisa menciptakan rasa nyaman sehingga dapat menarik para wisatawan.

Adapun Sarana dan Prasarana Wisata Seni Budaya yang ada di Kabupaten Ponorogo Diantaranya :

a. Sarana Pokok Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo.

1). Hotel / penginapan.

Dari hasil observasi, keberadaan Hotel / penginapan di kabupaten Ponorogo cukup memadai. Hal ini juga dipertegas dengan hasil wawancara seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ir. H. Hari Soebito, MM Kasubdin Sarana dan Jasa Usaha Wisata sebagai berikut :

” Saya melihat ada banyak Hotel dan penginapan di Ponorogo ini dengan kondisi yang cukup baik dan tarifnyapun tidak terlalu mahal, sehingga memudahkan pengunjung untuk beristirahat dan menghilangkan lelah” (22 April 2008 11.30 WIB di dinas pariwisata dan seni budaya Ponorogo)

Keberadaan sarana pokok Pariwisata sangat penting untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata yang termasuk sarana pokok pariwisata adalah menginap / hotel, Rumah makan / Restoran. Oleh karena itu bagi daerah tujuan wisata harus terdapat Hotel dan Rumah makan yang cukup memadai.

Berdasarkan hasil dokumentasi penulis, di Kabupaten Ponorogo terdapat banyak hotel / penginapan, yang selanjutnya secara rinci terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 : Sarana hotel dan penginapan Kabupaten Ponorogo

No	Nama Hotel/ Penginapan	Tarif / Harga	Lokasi
1	Hotel Ponorogo Permai	55.000 –220.000	Jl. Jend. Sudirman
2	Hotel Gajah Mada	50.000 – 270.000	Jl.Gajah Mada
3	Hotel kencana Dewi	25.000 – 132.000	Jl. Diponegoro
4	Hotel Dirgahayu	40.000 – 150.000	Jln. Sukarno Hatta
5	Hotel SAA Nuansa	25.000 – 75.000	Jl. Sultan Agung
6	Hotel Latiban	70.000 – 175.000	Jl.Ahmad Dahlan
7	Hotel Sentrum	20.000 – 30.000	Jl. Sukarno Hatta
8	Hotel Aman	25.000 – 35.000	Jln. Sukarno Hatta
9	Penginapn Seloaji	30.000- 50.000	Jl. Ponorogo-Madiun
10	Hotel Indonesia	20.000 – 35.000	Jl. Sukarno Hatta
11	Hotel Pantas	25.000 – 35.000	Jl. Diponegoro
12	Hotel Gembira	15.000 – 20.000	Jl. Gajah Mada
13	Hotel Larasati	15.00 – 20.000	Jl. Basuki Rahmad
14	Losmen Tlogorejo	40.000	Ds. Gondowido, Ngebel ponorogo
15	Losmen Wilis	50.000	Ds. Gondowido, Ngebel Ponorogo

Sumber : Data Primer, diolah.

Berdasarkan dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah Hotel / penginapan ada 15 buah. Dimana ada Hotel kelas melati 12 buah, dan ada losmen ada 3 buah. Masing- masing hotel / penginapan tersebut disertai dengan dengan fasilitas yang memadai dan pelayanan yang memuaskan bagi wisatawan. dan dengan tarif yang tidak begitu mahal. Akan tetapi keadaan hotel / penginapan di kabupaten ponorogo secara umum belum begitu maksimal. Dengan demikian kiranya masih perlu peningkatan agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. Cara yang ditempuh untuk mengembangkan sarana Hotel ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Hotel.

2).Rumah Makan / Restoran

Sarana pokok pariwisata lainnya yang sangat penting adalah Rumah makan. Berdasarkan observasi penulis, dalam penelitian di kabupaten Ponorogo memiliki jumlah rumah makan/Restoran yang memadai sebagai daerah tujuan wisata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 10 : Data Rumah Makan / Restoran di kab. Ponorogo.

No	Nama Rumah Makan/ Restoran	Alamat
1	RM. Singgalang	Jl. Gatot Subroto Ponorogo
2	Rm. Sami Lumayan	Jl Diponegoro Ponorogo
3	RM. Diponegoro	Jl Diponegoro Ponorogo
4	Rm. Bu rusmin	Jl Diponegoro Ponorogo
5	Rm. Ramayana	Jl Kh Ahmad Dahlan Ponorogo
6	Rm. Nikmat Rini Abadi	Jl Bhatoro Katong Ponorogo
7	Rm. Amad	Jl MH Thamrin Ponorogo
8	Rm. Ramayana	Jl Jend. Sudirman Ponorogo
9	Rm. Gajah Mada	Jl. Gajahmada Ponorogo
10	Rm. Hbi indah	Jl. Raya siman Ponorogo
11	Rm. Amperta Kapau	Jl. Gatot Subroto
12	Rm. Hayam Wuruk	Jl. KH A. Dahlan Ponorogo
13	Rm. Famili	Jl. A Yani Ponorogo
14	Rm. Maksih	Jl Jaksa Agung Ponorogo
15	Catering Arlito	
16	Catering Immanuel	
17	Catering antara	
18	Catering Tukri Sobikun	
19	Catering Martini	
20	Catering Ratih Dharma Setya	
21	Catering Nova	
22	Catering Widyastuti	
23	Catering Mamik	
24	Planet Warok Cafe	Jl Bathoro Katong Ponorogo
25	Jazz Cafe	Jl Thamrin Ponorogo

Sumber : Data Primer, diolah.

Dari beberapa rumah Makan/Restoran yang tersedia yang ada di kabupaten Ponorogo masih banyak adanya Depot, Cafe, Warung dan Catering yang kurang lebih 113 Rumah Makan dan Depot, 14 Catering, dan 230 Warung yang tersebar di kecamatan kota dan jumlah keseluruhan 357 Rumah makan Depot dan Warung.

Akan tetapi keadaan Rumah Makan / Restoran di kabupaten ponorogo secara umum belum begitu maksimal. Dengan demikian kiranya masih perlu peningkatan agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. Cara yang ditempuh

untuk mengembangkan sarana Rumah makan / Restoran ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitasnya .

Sedangkan prasarana vital yang cukup berperan antara lain:

1). Jalan / Transportasi.

Salah satu prasarana transportasi yang cukup penting dalam kepariwisataan dan demi kemudahan wisatawan ketempat tujuan wisata adalah jalan. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa prasarana transportasi khususnya jalan dikabupaten ponorogo yang menuju ketempat wisata masih sangat kurang. Jalan menuju obyek wisata sangat sempit dan berkelok-kelok sehingga sulit untuk dilalui bus besar sehinga wisatawan yang datang biasanya menggunakan kendaraan pribadi/sepeda motor. Hal inilah yang menjadi kendala utama dalam pengembangan sektor Wisata. Pemerintah daerah kabupaten ponorogo mulai perbaikan kualitas jalan di samping penambahan panjang jalan menuju tempat wisata. Hal ini cukup menggembirakan mengingat dengan meningkatnya kondisi dan kualitas jalan maka banyaknya wisatawan akan semakin mudah menikmati perjalanan wisatanya dan semakin lancar.

Dari hasil wawancara, menurut pendapat Bp. Drs. Wahyu Ari Basuki, M.Si selaku Kasi Akomodasi Diparsenibud kab. Ponorogo menyatakan :

"Prasarana Wisata yang ada di kabupaten Ponorogo perlu di kembangkan kembali mengingat jalan yang menuju ke obyek wisata sudah ada peningkatan terutama peningkatan akseibilitas yang mana memperpendek waktu tempuh untuk tujuan wisata sealin itu juga perlunya penambahan jumlah angkutan ke obyek wisata."(26 April 2008 11.30 WIB di dinas pariwisata dan seni budaya Ponorogo)

Berdasarkan dokumentasi data sumber yang telah diolah, dapat dilihat dalam tabel berikut ini data transportasi perjalanan wisata di Kabupaten Ponorogo

Tabel 11 : Data Transportasi Perjalanan Wisata di Kabupaten Ponorogo.

No	Nama Usaha Transportasi	Alamat
1	Tamansari Transport	Jl Bukit ketekan, Jenangan Ponorogo
2	Surya Kencana Indah	Jl. Parikesit Ponorogo
3	Fresh- 21	Jl. Sekar Pudak Tonatan Ponorogo
4	Nuansa	Jl. Parikesit Ponorogo
5	Mekarsari	Jl. Ir. H.Juanda Ponorogo
6	Alivia	Jl. Jend Sudirman Ponorogo
7	SAA Nuansa	Jl. Sultan Agung Ponorogo
8	Sinar mas Mukti	Jl. Arif Rahman Hakim ponorogo
9	Surya Mas	Jl. Arif Rahman Hakim Ponorogo
10	Anto Wijaya	Jl. Raya Ponorogo- Trenggalek.
11	Cakrawala	Jl. Kumbokarno Ponorogo
12	CV. Daru Purwita	Jl. Trunojoyo Ponorogo
13	Sinduro jaya	Jl. Sinduro Ponorogo

Sumber : Sumber : Data Primer, diolah.

Dari Data diatas di kabupaten Ponorogo ada 13 usaha transportasi perjalanan wisata yang mana dikelola sebagian besar oleh pihak swasta.dari transportasi perjalanan wisata itu perlu penambahan agar perjalanan wisata akan lebih optimal.dan selain itu juga perlu penambahan jumlah angkutan ke obyek wisata.

2). Listrik.

Tenaga listrik di Kabupaten Ponorogo dilayani perusahaan listrik negara (PLN). Jaringan listrik PLN sudah menjangkau seluruh wilayah sampai ke pelosok kabupaten Ponorogo. Tiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah pemakaian listrik, dan berdasarkan pengamatan penulis di lapangan hampir seluruh obyek wisata di kabupaten Ponorogo sudah menggunakan prasarana listrik yang *didistribusi oleh PLN*.

3). Air bersih.

Kebutuhan air bersih di kabupaten Ponorogo berdasarkan pengamatan penulis masyarakat menggunakan fasilitas air bersih dari PDAM, air sumur dan sumber mata air. Fasilitas air bersih dari PDAM lebih banyak dimanfaatkan masyarakat yang pedesaan yang memiliki karakteristik daerah perkotaan dan daerah yang relatif datar.

Berdasarkan observasi penulis, hampir seluruh obyek wisata di kabupaten Ponorogo tidak menggunakan fasilitas air dari PDAM tetapi memanfaatkan sumber mata air kecuali wisata budaya Grebeg Suro.

4). Telekomunikasi.

Berdasarkan observasi penulis, telekomunikasi khususnya pengguna telepon mengalami peningkatan yang cukup pesat bagi wisatawan. Dalam beberapa tahun terakhir ini sarana komunikasi yang berkembang pesat adalah telepon selular. Walaupun tidak tersedia data mengenai perkembangan telepon selular di tempat wisata, namun dapat dilihat hampir di mana-mana di jumpai pengguna ponsel khususnya dalam perjalanan jauh, selain itu menjamurnya

penjual handphone dan pengisian pulsa yang berada dilingkungan wisata yang merupakan indikasi pesatnya penggunaan jenis telepon selular. Namun perkembangan penggunaan ponsel yang pesat tidak membawa pengaruh pada penurunan pengguna wartel, artinya keberadaan wartel di tempat wisata masih tetap dibutuhkan oleh wisatawan.

5). Kesehatan.

Keberadaan Prasarana kesehatan sangat penting bagi wisatawan. Berdasarkan data sumber yang didapat penulis, berikut ini data Prasarana Kesehatan yang ada di kabupaten Ponorogo.

Tabel 12 : Prasarana kesehatan di Kabupaten Ponorogo .

No	Fasilitas	Jumlah
1	Rumah Sakit pemerintah	1 buah
2	Rumah sakit swasta	8 buah
3	Puskesmas rawatan	15 buah
4	Puskesmas pembantu	54 buah
5	Pukesmas keliling	20 buah
6	Dokter spesialis	15 orang
7	Dokter umum	40 orang
8	Bidan	316 orang
9	Perawat	297

Sumber : Data Primer, diolah.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui secara keseluruhan da kabupaten ponorogo terdapat 297 unit kesehatan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan khususnya dikawasan obyek wisata harus ada jaminan bahwa telah tersedia pelayanan memadai agar para wisatawan tidak merasa khawatir untuk berkunjung dikawasan wisata tersebut.

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata, prasarana kesehatan dilokasi obyek wisata dirasakan masih belum mencukupi. Berdasarkan pengamatan pengamatan penulis selama melakukan penelitian dilapangan bahwa belum dibangun dan disediakan pos khusus kesehatan untuk melayani kebutuhan kesehatan wisatawan yang berkunjung di oyek wisata.

6). Keamanan.

Penyediaan sarana keamanan sangat diperlukan dalam pengembangan sektor pariwisata karena hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan. Pemerintah telah melakukan berbagai tindakan untuk mewujudkan keamanan dengan melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait yang membidangi keamanan dan keselamatan para wisatawan.

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian dilapangan pelayanan keamanan dan ketertiban dilokasi obyek wisata dilaksanakan atas kerjasama dan koordinasi kepolisian, Koramil, BABINSA, pengelola obyek wisata, panitia penyelenggara, dan masyarakat disekitar obyek wisata. Selain itu dilokasi obyek wisata disediakan rambu-rambu tanda bahaya bagi daerah tertentu yang rawan akan tanah longsor.

7). Perbankan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan keuangan maka di kabupaten ponorogo sudah terdapat Bank baik itu Bank swasta maupun Bank Pemerintah. Berdasarkan hasil observasi penulis, jumlah Bank yang ada di kabupaten ponorogo meliputi: Bank Jatim, BRI, BCA, BNI, Bank Mandiri,

dan Bank Lippo. tetapi di obyek wisata masih belum adanya fasilitas perbankan tetapi di setiap kecamatan ada 1 fasilitas perbankan.

8). Industri yang mendukung sektor Wisata dan Seni budaya.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut pendapat Bp. Drs Gunardi Msi selaku kepala Dinas Pariwisata dan Seni budaya Kabupaten Ponorogo menyatakan:

“ Kabupaten Ponorogo sebenarnya memiliki berbagai industri pariwisata yang bisa mendukung pengembangan sektor pariwisata yang meliputi industri kerajinan Reog, Souvenir, furniture, lkerajinan dari kulit dan makanan khas, dsbyang sebenarnya memiliki peluang untuk berkembang menjadi industri yang besar dan memiliki ciri khas tersendiri.” *(26 April 2008 09.00 Wib di dinas pariwisata dan seni budaya Ponorogo)*

Adapun industri Wisata dan Seni Budaya yang saat ini dikembangkan oleh masyarakat Ponorogo untuk menarik wisatawan meliputi:

A. Sektor Industri Rumah Tangga (kerajinan Reog).

Industri Rumah tangga dan kerajinan tangan berkembang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemerintah mewujudkan pengembangan sektor ini dengan maksud menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat, mempertahankan kesenian tradisional sebagai warisan leluhur untuk mendukung pengembangan industri pariwisata ponorogo.

Berdasarkan hasil observasi, ada ribuan jumlah pengrajin di Ponorogo, mereka memproduksi barang yang berbeda seperti furniture, kerajinan dari kulit,

cinderamata/ souvenir Reog, lukisan, patung, makanan khas ponorogo, dan lain-lain.

Hal ini searah dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis, menurut ibu Farida nuraini, S.Sos, MM Staf Subdin Pemasaran Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupten Ponorogo menyatakan

“Bahwa dalam mengembangkan pekerjaan (kerajinan Reog), kebanyakan dari mereka menghadapi masalah klasik seperti tidak memiliki modal kerja yang cukup, rendahnya kemampuan memasarkan, kurangnya ketersediaan bahan baku dan produk yang dihasilkan berkualitas rendah.” (28 April 2008, 09.00 Wib Di Dinas pariwisata dan seni budaya kab. Ponorogo)

Maka dalam menghadapi hambatan ini, pemerintah daerah harus mengambil beberapa tindakan diantaranya:

1. Membuat kerjasama dengan Bank untuk memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah.
2. Membuat kerjasama dengan perusahaan yang lebih besar untuk memberikan bantuan teknik dan membantu mereka dalam memasarkan produknya.
3. Mengikuti sertakan produk mereka pada pameran kerajinan tangan secara teratur ditingkat lokal, regional dan nasional.
4. Mendorong mereka untuk meningkatkan penempilan produk mereka misalnya saja dengan mengemasnya dengan bungkus yang bagus.
5. Melakukan studi banding dengan pengrajin dari wilayah lain.
6. Mengupayakan pengenalan obyek dan Daya tarik wisata kepada wisatawan melalui kegiatan promosi dan kegiatan pemasaran yang

profesional, baik dalam maupun luar negeri, terus ditingkatkan secara terencana, terpadu dan efektif.

B. Industri Makanan dan Souvenir.

Untuk menarik wisatawan untuk datang ke Ponorogo yang tak kalah menarik adalah makanan Khas Ponorogo yaitu Sate Ponorogo, Dawet (jabung), Pabrik jenang (dodol). Dengan harga yang ekonomis juga wisatawan dapat menikmati makanan khas Ponorogo dengan kepuasan yang tersendiri. Dari berbagai makanan ini dapat membantu untuk menarik para wisatawan untuk datang ke Ponorogo untuk membawa oleh-oleh. selain sebagai pendapatan daerah dari sektor pajak juga sebagai peningkatan ekonomi masyarakat dan juga memberikan peluang bagi masyarakat ponorogo untuk lebih berkreatifitas dalam persaingan industri.

Dalam industri Souvenir ini kabupaten Ponorogo ada banyak macam contohnya: Kaos bergambar Reog miniatur Dadak merak, kuda kepang, Gantungan kunci Reog, pakaian khas Reog, topeng kesenian Reog, dsb. dalam hal ini perlu adanya pengembangan tetapi mereka menghadapi masalah dana sehingga terhambatnya pemasaran produk-produk yang ada di kabupaten ponorogo. selain itu juga masih kurangnya galeri /art shop yang menyediakan cenderamata khas kabupaten ponorogo.

4. Pengembangan kemampuan Pegawai Dinas pariwisata dan Seni Budaya sebagai pelaksana pemberdayaan potensi pariwisata.

Pegawai Dinas Pariwisata dan seni budaya merupakan pelaku utama dalam keberhasilan pengembangan wisata dan seni budaya. Yang dimaksud disini

adalah selain pihak yang terkait dengan usaha pariwisata sendiri yang merupakan induk dari kegiatan wisata tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut pendapat Bp. Drs Gunardi Msi selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya kab. Ponorogo menyatakan”

“ Yang menjadi permasalahan adalah Sumber Daya Manusia yang dihadapkan pada keterbatasan personil pegawai dinas pariwisata dan seni budaya sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaa tugas, apalagi kewenangan otda semakin luas membutuhkan personel yang mampu untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dalam pengembangan sektor Pariwisata.” *(28 April 2008, 08.00 Wib Di Dinas pariwisata dan seni budaya kab. Ponorogo)*

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah kabupaten Ponorogo dalam pemberdayaan pegawai dinas Pariwisata dan Seni budaya adalah:

1. Dengan diadakannya Diklat teknis pariwisata dan seni budaya bagi pegawai dinas pariwisata. Dengan diadakanya diklat pegawai tersebut bisa bekerja profesional sesuai bidangnya yaitu bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi wisatawan dan bisa menyesuaikan langkah dengan perkembangan industri pariwisata yang begitu pesat.
2. Kegiatan lain yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia di sektor wisata misalnya dengan mengikuti seminar-seminar, kursus-kursus yang berhubungan dengan pariwisata baik itu dalam maupun diluar wilayah Ponorogo.
3. Menertibkan dan perijinan usaha pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4. Menertibkan kehadiran pegawai di kantor saat kerja serta ketetapan jam waktu masuk dan pulang kerja.
5. Mengkoordinasi tinggi rendahnya hasil kerja dilihat dari kualitas dan kuantitas dan semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan sumberdata lainnya, penelitian yang diperoleh pada kantor dinas Pariwisata dan seni budaya kabupaten Ponorogo bila ditinjau dari kualitas sumber Daya manusia masih kurang memadai dalam melaksanakan pengembangan sektor wisata, karena terbatasnya Staf di Dinas pariwisata dan seni budaya kabupaten Ponorogo sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan kurang begitu maksimal. Selain itu dalam rangka melaksanakan pengembangan sektor wisata, penempatan personel pada jabatan tertentu yang sesuai dengan latar belakang pendidikan akan mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas terutama untuk mencapai hasil guna. dengan bidang tugas yang mereka kerjakan, maka pelaksanaan tugas secara maksimal belum tercapai. Oleh karena itu peran Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangat penting dalam pelaksanaan tugas.

5. Pengembangan Kesenian dan kebudayaan.

Dengan adanya latar belakang kabupaten Ponorogo sebagai daerah kesenian yang terkenal akan kesenian dan kebudayaannya maka hal tersebut dapat dikembangkan dengan baik maka akan menjadi fenomena yang menarik untuk dinikmati. Terselenggaranya berbagai Event seni budaya baik ditingkat daerah, nasional, maupun global dan upaya yang dituangkan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Adapun upaya dalam rangka

pengembangan seni dan budaya daerah di kabupaten ponorogo dituangkan melalui program-program sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pelestarian Seni budaya Daerah.
2. Pengembangan pemasaran Seni budaya daerah.
3. Pembinaan Seni budaya daerah.
4. Penyelenggaraan Event-event Seni budaya daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo telah melakukan berbagai upaya pengembangan kesenian dan kebudayaan. Seperti yang diungkapkan Bp. Subagyo, SH selaku kasi Atraksi wisata dan hiburan kab. Ponorogo mengatakan :

“Selama ini upaya yang telah dilakukan oleh Dinas pariwisata dalam mengembangkan kesenian dan kebudayaan dengan menyelenggarakan event-event seni budaya seperti Grebeg Suro, Festifal Reog Nasional, Festifal Reog pada bulan purnama, Festifal Reog mini, atraksi seni dan budaya yang diadakan didaerah.” *(1 Mei 2008, 11.00 wib di kantor dinas Pariwisata dan Seni budaya Kabupaten Ponorogo)*

Dan untuk mencapai program-program tersebut, maka perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat melestarikan seni budaya daerah. Kegiatan tersebut berupa Pertunjukan Kesenian, Festival, Pengiriman Delegasi.

a. Pertunjukan.

Dari hasil observasi, pertunjukan Seni budaya Daerah dilakukan 1 bulan sekali yaitu pertunjukan malam bulan purnama dan pertunjukan malam Jumat Pon. Pertunjukan ini dilaksanakan setiap bulan purnama dan seni budaya yang dipentaskan adalah kesenian REOG yang bertempat didepan Paseban Aloon-aloon

kota ponorogo. sedangkan pertunjukan malam jumat pon seni budaya yang dipentaskan wayang kulit yang bertempat di paseban Aloon-aloon kota ponorogo

Berdasarkan wawancara, seperti yang diungkapkan oleh Bp. Subagyo, SH selaku kasi Atraksi wisata dan hiburan kab. Ponorogo mengatakan :

“Pertunjukan tersebut merupakan tradisi masyarakat ponorogo yang telah dilakukan secara turun temurun, karena masyarakat beranggapan bahwa hari itu adalah hari yang tepat untuk melakukan “Tirakatan” (Berusaha mendekatkan diri pada sang pencipta) dan oleh karena itu pemerintah daerah menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan seni budaya tersebut” (1 April 2008, 11.00 wib di kantor dinas Pariwisata dan Seni budaya Kabupaten Ponorogo).

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah dengan mengadakan pertunjukan ini adalah agar masyarakat secara rutin dapat menyaksikan pertunjukan seni budaya tersebut sehingga di harapkan rasa cinta dan rasa turut memiliki seni budaya daerah dapat terus terjaga yang akhirnya masyarakat perlu untuk turun berperan aktif dalam upaya melestarikanya.

b. Festival.

Berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo No 172 tahun 2002 tentang penyelenggaraan dan pementasan seni budaya dikabupaten ponorogo dilaksanakan 2 kali setiap tahunnya yaitu grebeg Suro, dan hari Jadi kabupaten ponorogo yang dilaksanakan pada bulan agustus setiap tahunnya. Pengadaan festifal ini bertempat di panggung kebesaran Aloon-aloon kota ponorogo. Pengadaan festifal ini didukung oleh peralatan yang modern dan serba canggih

untuk menambah keindahan pentas. Festival ini merupakan moment yang sangat besar.

Upaya pengembangan tersebut juga dilakukan melalui sekolah baik mulai jenjang SD/ MI hingga SMU/ MA untuk menjadikan kesenian Reog ponorogo menjadi salah satu materi pelajaran ekstrakurikuler. Untuk menindak lanjuti hal tersebut serta sekaligus sebagai upaya regenerasi, telah diselenggarakan festival Reog Mini yang pesertanya murid SD/ MI.

Adapun maksud dan tujuan dari diadakannya festival ini adalah :

- ~ Memelihara, Melestarikan dan memajukan kesenian Reog ponorogo sebagai khasanah budaya daerah dalam menunjang kebudayaan nasional.
- ~ Wahana Pengembangan Seni Reog Ponorogo untuk memenuhi tuntutan pembangunan budaya nasional dalam era globalisasi dan modernisasi dengan tanpa meninggalkan ciri khas tradisional yang sakral.
- ~ Mendorong kreatifitas Seniman dalam kiprahnya secara positif, Responsif, dan menempuh perjalanan hidup dan kehidupan berkesenian yang lebih terarah dan berkualitas.

Upaya-upaya yang dilakukan diatas sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bp.Bambang Wibisono, S.Sn selaku Kasi Kesenian Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kab. Ponorogo menyatakan :

“Selama ini upaya yang telah dilakukan oleh Dinas pariwisata dalam mengembangkan kesenian adalah dengan mengadakan festival seni dan budaya yang diadakan baik dalam daerah yang biasanya pada waktu acara Grebeg Suro dan waktu memperingati hari jadi kabupaten Ponorogo. Maka dari itu perlu pembinaan

kapada masyarakat agar kesenian tradisional itu tetap terjaga dengan baik. (1 April 2007, 11.00 wib di kantor dinas Pariwisata dan Seni budaya Kabupaten Ponorogo).

c. Pembentukan Unit Reog pada warga Desa/ kelurahan di kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan instruksi Bupati ponorogo No 2 tahun 1994 tentang pembentukan unit Reog ponorogo pada masing-masing desa/ kelurahan telah di bentuk unit Reog berupa paguyuban. Berdasarkan data sumber penelitian, paguyuban Reog terbentuk hingga tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel :13 Data Paguyuban Reog ponorogo Tahun 2006

No	Kecamatan	Reog	Reog Mini
1	Ngrayun	8	1
2	Slahung	10	1
3	Bungkal	18	1
4	Sambit	17	1
5	Sawoo	23	1
6	Sooko	5	1
7	Pulung	17	1
8	Mlarak	10	1
9	Siman	14	1
10	Jetis	12	1
11	Balong	9	1
12	Kauman	4	1
13	Jambon	4	1
14	Badegan	6	1
15	Sampung	12	1
16	Sukorejo	12	1
17	Ponorogo	20	1
18	Babadan	12	1
19	Jenangan	10	1
20	Ngebel	8	1
21	Pudak	2	1
	Jumlah	233	21

Sumber : Data Primer, diolah.

Dari data diatas jumlah paguyuban Reog lumayan cukup banyak maka dari itu perlu pengelolaan dan perhatian yang optimal sehingga seni budaya tradisional tetap terjaga dan perlu adanya pengembangan yang optimal.

d. Pengiriman Delegasi.

Kabupaten Ponorogo akan mengirimkan Delegasinya dalam setiap perlombaan seni budaya di tingkat daerah, propinsi, nasional maupun internasional. selain itu pengiriman Delegasi ini dilakukan jika ada daerah lain yang menginginkan seni budaya daerah ponorogo ditampilkan di daerah tersebut. Kabupaten ponorogo pernah mengirim Delegasi kesenian Reog ke Suriname (1997), New Zealand (2000) dan Jepang (2001). Hal ini merupakan salah satu langkah dalam rangka memperkenalkan Seni budaya daerah kabupaten ponorogo dan akan menambah pendapatan Daerah sehingga ada kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Pariwisata Kabupaten Ponorogo.

1. Faktor Pendukung Pemberdayaan Pariwisata Kabupaten Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo merupakan suatu daerah yang memiliki wilayah yang sangat menarik dan berpotensi untuk dikembangkan khususnya sektor Wisata dan Seni Budaya. Faktor Pendukung dari sektor pengembangan wisata seni budaya ini diantaranya :

1. Kabupaten Ponorogo memiliki latar belakang kesenian dan kebudayaan yang hebat yaitu kesenian Tradisional Reog Ponorogo yang menjadi andalan kesenian masyarakat Ponorogo. Apabila ini bisa dikembangkan

dengan baik maka bisa menjadikan kabupaten ponorogo menjadi daerah tujuan wisata unggulan.

2. Letak kabupaten Ponorogo yang strategis, sehingga diupayakan menjadi salah satu tujuan wisata, karena letaknya antara Bali dan Yogyakarta yang merupakan dua propinsi yang terkenal dengan tujuan wisata mancanegara.
3. Karena stabilitas sosial, ekonomi politik dan keamanan yang mantap sehingga dapat memberikan jaminan rasa aman bagi wisatawan dan memberikan peluang bagi penyelenggara kepariwisataan..
4. Potensi kesenian kabupaten Ponorogo yang cukup menjanjikan yaitu kesenian Reog Ponorogo yang dapat memberi nilai jual tinggi dan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke ponorogo.
5. Instruksi Bupati Ponorogo no 2 tahun 1994 tentang pembentukan unit REOG pada masing- masing desa/ kelurahan.
6. Partisipasi masyarakat yang begitu antusias dalam ikut serta pengembagn wisata seni budaya.

2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Pariwisata Kabupaten Ponorogo.

Dalam kegiatan pengembangan sektor pariwisata di kabupaten ponorogo pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya dalam melibatkan berbagai pihak baik masyarakat swasta maupun instansi terkait. Namun demikian dalam kegiatan tersebut masih ditemukan hambatan-hambatan sehingga sebelum membuahkan hasil yang optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dilokasi penelitian, maka

kiranya dapat ditemukan disini mengenai faktor-faktor penghambat yang terdiri atas berbagai permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi.

Ada beberapa faktor penghambat dalam pengembangan wisata dan seni budaya antara lain:

1. Kurang terpadunya pengembangan pariwisata dengan pengembangan sektor lain yang mendukung. Hal ini dapat di cerminkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukungnya seperti misalnya jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, listrik dan air bersih di sejumlah daerah tujuan wisata.
2. Keterbatasan dana yang tersedia sehingga pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dilaksanakan secara optimal, dan hal inilah yang menjadi permasalahan yang utama.
3. Masih kurangnya peran serta dunia usaha wisata dan seni budaya perlu ditingkatkan mengingat citra positif produk wisata sangat ditentukan oleh para pelaku usaha pariwisata.
4. Informasi tentang kepariwisataan yang disediakan masih terbatas dan banyak perlu dimutakhirkan datanya dan khususnya informasi tentang wisata dan seni budaya sangat terbatas.
5. Masih kurangnya barang-barang cinderamata dan masih perlu dikembangkan, baik yang menyangkut cinderamata yang mudah dibawa yang mencerminkan ciri khas daerah maupun produksi-produksi yang dengan kemasan yang menarik dan harga yang terjangkau.

6. Mutu produksi dan pelayanan wisata yang ada perlu ditingkatkan terutama akomodasi, penyajian obyek dan daya tarik wisata yang kurang direncanakan sehingga memberi kesan kurang menarik.
7. Fasilitas jalan untuk menuju obyek wisata khususnya ngebel sangat sempit dan berkelok-kelok padahal obyek wisata ini menjadi tujuan utama wisata hal ini yang menjadi kendala-kendala pengembangan sektor wisata dan menyebabkan penghambatnya pengembangan wisata..
8. Persaingan untuk mendapat pangsa pasar wisatawan mancanegara semakin tajam.

E. ANALISA DATA.

1. Kontribusi Sektor Wisata dan Seni Budaya terhadap PAD Kabupaten Ponorogo.

Untuk mengetahui kontribusi Pendapatan dari sektor Wisata dan Seni budaya kabupaten Ponorogo terlebih dulu jumlah Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya selama 4 (Empat) tahun terakhir yang terealisasi yaitu tahun 2003 sebesar 103.62 %, kemudian tahun 2004 sebesar 101.57 %, tahun 2005 sebesar 109.10 % dan tahun 2006 sebesar 117.05 %. Dan total pendapatan selama empat Tahun terakhir sebesar 108.44 %.

Salah satu sektor yang sekarang ini sedang dikembangkan di kabupaten Ponorogo adalah sektor wisata dan seni budaya, dengan harapan kontribusi yang diberikan dari sektor pariwisata meningkat sehingga dapat memberikan peningkatan pendapatan terhadap PAD. Sedangkan jumlah pendapatan sektor Wisata dan Seni budaya di kabupaten Ponorogo sangat besar, Dan tiap tahunnya

mengalami kenaikan. Pada tahun 2003 pendapatan yang dihasilkan sebesar 101.42 % dan tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 115.14 % dan kemudian pada tahun 2005 sebesar 120.32 % serta pada tahun 2006 Meningkat sebesar 159.26 %. Dan total Pendapatan dari sektor pariwisata selama 4 tahun terakhir sebesar 126.34 %.

Selanjutnya peneliti sajikan Kontribusi yang diberikan sektor wisata dan seni budaya terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Ponorogo pada tahun 2003 2.78 % Tahun 2004 3.54% Tahun 2005 3.61% dan tahun 2006 4.09 % terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Total keseluruhan selama empat tahun terakhir sebesar 38.5 %

Apabila diamati tentang perolehan PAD selama kurun waktu 4 (Empat) tahun terakhir terlihat menunjukkan kecenderungan peningkatan. tetapi dari hasil penelitian kontribusi yang diberikan dari sektor wisata seni budaya masih kecil. Maka untuk itu perlu peningkatan dari kontribusi wisata terhadap PAD ponorogo ini dengan melakukan langkah-langkah untuk lebih meningkatkan kontribusi wisata seni budaya terhadap PAD Kabupaten ponorogo. Ini dikarenakan dari sekian banyaknya obyek wisata yang ada hanya ada 3 obyek wisata yang dapat memberikan kontribusi dalam menunjang PAD.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sektor wisata dan seni budaya merupakan sektor yang memiliki pengaruh yang cukup menjanjikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo, meskipun selama ini banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan sektor wisata ini.

2. Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upaya pemberdayaan potensi

Pariwisata.

Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur memiliki obyek beragam obyek wisata serta keanekaragaman kesenian dan kebudayaan karena itu kabupaten Ponorogo bisa disebut sebagai daerah tujuan wisata.

Berdasarkan data yang dihimpun peneliti, dapat dianalisis dan diinterpretasikan bahwa jenis-jenis wisata yang ada di kabupaten Ponorogo meliputi Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Religius, Wisata Buatan. Dari sekian banyak potensi wisata yang ada kesemuanya sudah dikelola dan ditangani dengan baik oleh pemerintah kabupaten Ponorogo, dalam hal ini sebagai pelaksananya adalah Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo. Dari semua potensi yang ada tersebut apabila di kelola dan dikembangkan dengan maksimal maka akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD dan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar Obyek Wisata.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian dari semua potensi yang ada baru beberapa Obyek wisata saja yang dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Ponorogo. Dengan alasan adanya keterbatasan dana sehingga untuk pengembangan obyek wisata yang lain seperti Cinderamata, makanan Khas serta produk-produk unggulan yang lain belum bisa dikembangkan dengan optimal. Oleh karena itu diperlukan pengembangan lebih intensif terhadap potensi wisata yang ada tersebut agar memberikan kontribusi yang maksimal kepada Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mengupayakan berbagai jenis pengembangan sektor wisata dan Seni Budaya antara lain:

a. Peningkatan pemasaran dan Promosi wisata Seni budaya.

Peningkatan pengembangan pemasaran dan promosi wisata seni budaya adalah meningkatkan aktifitas pariwisata harus disertai dengan usaha-usaha penyebarluasan atau pengenalan oleh pemerintah kabupaten ponorogo melalui pemasangan gambar-gambar atau poster-poster di tempat umum. Penyebarluasan leaflet, pamflet atau pouldar, baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Pembuatan kalender yang bergambar obyek-obyek dan daya tarik wisata di kabupaten ponorogo, baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.

berdasarkan pengamatan peneliti kegiatan pemasaran dan promosi yang dilakukan selama ini hanya terbatas dalam negeri saja. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana dan apabila dilihat dari sarana jalan menuju obyek wisata belum memenuhi standar kelayakan sebab jalannya sangat sempit sehingga untuk jalan bus besar sangat kesulitan. Hal inilah yang menjadikan promosi yang dilakukna hanya sebatas dalam negeri saja.

b. Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Dalam pengembangan di Kabupaten ponorogo tidak dapat berjalan dengan sukses apabila tidak disertai dengan obyek wisata yang memiliki daya Tarik tersendiri di bandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu diperlukan pengembangan terhadap Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Sesuai dengan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Obyek dan Daya Tarik Wisata, akan tetapi

pengembangan tersebut belum terlaksana dengan baik sesuai program yang ditetapkan, mengingat adanya keterbatasan dana yang tersedia. Sehingga dalam pengembangan daya tarik wisata tersebut perlu ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata yang ada di kabupaten ponorogo.

3. Pengembangan Sarana Prasarana Wisata.

1. Sarana pokok pariwisata.

a. Hotel dan penginapan.

Keberadaan sarana pokok Pariwisata sangat penting untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata yang termasuk sarana pokok pariwisata adalah Hotel / penginapan. Oleh karena itu bagi daerah tujuan wisata harus terdapat Hotel dan penginapan yang cukup. Berdasarkan pengamatan penulis di kabupaten ponorogo terdapat 15 Hotel / penginapan. Dimana ada Hotel kelas melati 12 buah, dan ada losmen ada 3 buah. Masing- masing hotel / penginapan tersebut disertai dengan dengan fasilitas yang memadai dan pelayanan yang memuaskan bagi wisatawan. dan dengan tarif yang tidak begitu mahal.

b. Rumah makan dan restoran.

Berdasarkan Sarana pokok pariwisata lainnya yang sangat penting adalah Rumah makan. Berdasarkan pengamatan penulis dalam penelitian di kabupaten Ponorogo memiliki jumlah rumah makan/ Restoran sebanyak 113 Rumah Makan dan Depot, 14 Catering, dan 230 Warung yang tersebar di kecamatan kota dan jumlah keseluruhan 357 Rumah makan Depot dan Warung..

c. Jalan / transportasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian langkah yang diambil Pemerintah daerah kabupaten ponorogo dalam perbaikan kualitas jalan di samping penambahan panjang jalan menuju tempat wisata. hal ini dapat dilihat dari jumlah penambahan panjang jalan selama tahun 2005 hanya 0,78 Km dari tahun 2003. sementara jenis permukaan jalan aspal telah mencapai 80 % dan jalan tanah menurun persentasenya menurun secara signifikan menjadi 20 %. Sedangkan dalam sarana Transportasi Wisata Kabupaten Ponorogo memiliki 13 usaha transportasi perjalanan wisata yang mana dikelola sebagian besar oleh pihak swasta.

a. Listrik.

Berdasarkan hasil dari penelitian Tenaga listrik di kabupaten ponorogo dilayani perusahaan listrik negara (PLN). Jaringan listrik PLN sudah menjangkau seluruh wilayah sampai ke pelosok kabupaten ponorogo. Tiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah pemakaian listrik. dan berdasarkan pengamatan penulis dilapangan hampir seluruh obyek wisata di kabupaten ponorogo sudah menggunakan prasarana listrik yang didistribusi oleh PLN.

b. Air bersih.

Berdasarkan hasil dari penelitian Kebutuhan air bersih di kabupaten Ponorogo menggunakan fasilitas air bersih dari PDAM, air sumur dan sumber mata air. Fasilitas air bersih dari PDAM lebih banyak di manfaatkan masyarakat yang pedesaan yang memiliki karakteristik daerah perkotaan dan daerah yang relatif datar. Berdasarkan pengamatan penulis, hampir seluruh obyek wisata da

kabupaten ponorogo tidak menggunakan fasilitas air dari PDAM tetapi memanfaatkan sumber Mata air kecuali wisata budaya Grebeg Suro.

c. Telekomunikasi

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa dilokasi obyek wisata sarana komunikasi menggunakan telepon selular. Walaupun tidak tersedia data mengenai perkembangan telepon selular ditempat wisata, namun dapat dilihat hampir dimana-mana di jumpai pengguna ponsel khususnya dalam perjalanan jauh. selain itu menjamurnya penjual handphone dan pengisian pulsa yang berada dilingkungan wisata yang merupakan indikasi pesatnya penggunaan jenis telepon selular. Namun perkembangan penggunaan ponsel yang pesat tidak membawa pengaruh pada penurunan pengguna wartel, artinya keberadaan wartel di tempat wisata masih tetap dibutuhkan oleh wisatawan.

Dengan adanya hal tersebut upaya pemerintah setempat melakukan pengembangan dengan pihak-pihak terkait untuk menambah jaringan / pembangunan tower dilokasi wisata agar para wisatawan mudah dalam melakukan komunikasi di oyek wisata

e. Kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian kabupaten ponorogo terdapat 297 unit kesehatan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan khususnya dikawasan obyek wisata harus ada jaminan bahwa telah tersedia pelayanan memadai agar para wisatawan tidak merasa khawatir untuk berkunjung dikawasan wisata tersebut.

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata, prasarana kesehatan dilokasi obyek wisata dirasakan masih belum mencukupi. Berdasarkan pengamatan pengamatan penulis selama melakukan penelitian dilapangan bahwa belum dibangun dan disediakan pos khusus kesehatan untuk melayani kebutuhan kesehatan wisatawan yang berkunjung di obyek wisata. Maka untuk itu pemerintah setempat dalam hal ini perlu pengembangan prasarana kesehatan dilokasi obyek wisata yang setidaknya ada beberapa pos kesehatan yang tersedia.

f. Keamanan.

Penyediaan sarana keamanan sangat diperlukan dalam pengembangan sektor pariwisata karena hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan. Pemerintah telah melakukan berbagai tindakan untuk mewujudkan keamanan dengan melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait yang membidangi keamanan dan keselamatan para wisatawan.

Berdasarkan pengamatan penulis selamamelakukan penelitian dilapangan pelayanan keamanan dan ketertiban dilokasi obyek wisata dilaksanakan atas kerjasama dan koordinasi kepolisian, Koramil, BABINSA, pengelola obyek wisata, panitia penyelenggara, dan masyarakat disekitar obyek wisata. Selain itu dilokasi obyek wisata disediakan rambu-rambu tanda bahaya bagi daerah tertentu yang rawan akan tanah longsor.

g. Perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan keuangan maka di kabupaten ponorogo sudah terdapat Bank baik itu Bank swasta maupun Bank Pemerintah. Jumlah Bank yang ada di

kabupaten ponorogo meliputi: Bank Jatim, BRI, BCA, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Lippo. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa seluruh lokasi obyek wisata belum tersedia prasarana perbankan. Sehingga para wisatawan kesulitan apabila memerlukan uang untuk kebutuhan mendadak. Seharusnya pemerintah kabupaten ponorogo sebagai daerah tujuan wisata mengupayakan tersedianya prasarana tersebut.

h. Industri yang mendukung sektor wisata.

Industri Rumah tangga dan kerajinan tangan berkembang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemerintah mewujudkan pengembangan sektor ini dengan maksud menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat, mempertahankan kesenian tradisional sebagai warisan leluhur untuk mendukung pengembangan industri pariwisata ponorogo.

Berdasarkan hasil penelitian Ada ribuan jumlah pengrajin di Ponorogo, mereka memproduksi barang yang berbeda seperti furniture, kerajinan dari kulit, cinderamata/ souvenir Reog, lukisan, patung, makanan khas ponorogo.

Bahwa Dalam Mengembangkan pekerjaan (kerajinan Reog), kebanyakan dari mereka menghadapi masalah klasik seperti ; tidak memiliki modal kerja yang cukup, rendahnya kemampuan memasarkan, kurangnya ketersediaan bahan baku dan produk yang dihasilkan berkualitas rendah. Maka untuk itu langkah yang perlu diambil oleh pemerintah adalah :

- *Pengembangan kemampuan Pegawai Dinas pariwisata dan Seni Budaya sebagai pelaksana pengembangan pariwisata.*

Pegawai Dinas Pariwisata dan seni budaya merupakan pelaku utama dalam keberhasilan pengembangan wisata dan seni budaya. Yang

dimaksud disini adalah selain pihak yang terkait dengan usaha pariwisata sendiri yang merupakan induk dari kegiatan wisata tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada kantor dinas Pariwisata dan seni budaya kabupaten ponorogo bila ditinjau dari kualitas sumber Daya manusia masih kurang memadai dalam melaksanakan pengembangan sektor wisata, karena terbatasnya Staf di Dinas pariwisata dan seni budaya kabupaten ponorogo sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan kurang begitu maksimal. Selain itu dalam rangka melaksanakan pengembangan sektor wisata, penempatan personel pada jabatan tertentu yang sesuai dengan latar belakang pendidikan akan mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas terutama untuk mencapai hasil guna. dengan bidang tugas yang mereka kerjakan, maka pelaksanaan tugas secara maksimal belum tercapai. Oleh karena itu peran Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangat penting dalam pelaksanaan tugas.

– *Pengembangan Kesenian dan kebudayaan.*

Dengan adanya latar belakang kabupaten Ponorogo sebagai daerah kesenian yang terkenal akan kesenian dan kebudayaanya maka hal tersebut dapat dikembangkan dengan baik maka akan menjadi fenomena yang menarik untuk dinikmati. Dan untuk mencapai program-program tersebut, maka perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat melestarikan seni budaya daerah. Kegiatan tersebut berupa Pertunjukan Kesenian, Festival, Pengiriman Delegasi.dan Membentuk suatu wadah / tempat guna untuk berkumpulnya para seniman, kreatifitas intelektual budaya untuk berdialog, berekspresi agar kesenian dan kebudayaan kabupaten ponorogo

yang berupa Paguyuban Reog .di kabupaten ponorogo sendiri mempunyai kurang lebih 233 paguyuban reog dan pemda setempat membuat kebijakan setiap desa diwajibkan mempunyai 1 paguyuban reog.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat pemberdayaan potensi pariwisata Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa ada beberapa faktor pendukung upaya pengembangan sektor wisata dan seni budaya di kabupaten ponorogo yang selanjutnya dianalisis sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung dalam Pengembangan Wisata dan Seni Budaya kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo memiliki latar belakang kesenian dan kebudayaan yang hebat yaitu kesenian Tradisional Reog Ponorogo yang menjadi andalan kesenian masyarakat Ponorogo. Apabila ini bisa dikembangkan dengan baik maka bisa menjadikan kabupaten ponorogo menjadi daerah tujuan wisata unggulan.
2. Letak kabupaten ponorogo yang strategis, sehingga diupayakan menjadi salah satu tujuan wisata, karena letaknya antara Bali dan Yogyakarta yang merupakan dua propinsi yang terkenal dengan tujuan wisata mancanegara.
3. Karena stabilitas sosial, ekonomi politik dan keamanan yang mantap sehingga dapat memberikan jaminan rasa aman bagi wisatawan dan memberikan peluang bagi penyelenggara kepariwisataan..
4. Potensi kesenian kabupaten Ponorogo yang cukup menjanjikan yaitu kesenian Reog Ponorogo yang dapat memberi nilai jual tinggi dan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke ponorogo.

5. Instruksi Bupati Ponorogo No 2 tahun 1994 tentang pembentukan unit REOG pada masing-masing desa/ kelurahan.
6. Partisipasi masyarakat yang begitu antusias dalam ikut serta pengembangan wisata seni budaya.

Menurut Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Ponorogo, ada beberapa faktor penghambat dalam pengembangan wisata dan seni budaya antara lain:

1. Kurang terpadunya pengembangan pariwisata dengan pengembangan sektor lain yang mendukung. Hal ini dapat di cerminkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukungnya seperti misalnya jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, listrik dan air bersih di sejumlah daerah tujuan wisata.
2. Keterbatasan Dana yang tersedia sehingga pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dilaksanakan secara optimal, dan hal inilah yang menjadi permasalahan yang utama.
3. Masih kurangnya peran serta dunia usaha wisata dan seni budaya perlu ditingkatkan mengingat citra positif produk wisata sangat ditentukan oleh para pelaku usaha pariwisata.
4. Informasi tentang kepariwisataan yang disediakan masih terbatas dan banyak perlu dimutakhirkan datanya dan khususnya informasi tentang wisata dan seni budaya sangat terbatas.
5. Masih kurangnya barang-barang cinderamata dan masih perlu dikembangkan, baik yang menyangkut cinderamata yang mudah dibawa

yang mencerminkan ciri khas daerah maupun produksi-produksi yang dengan kemasan yang menarik dan harga yang terjangkau.

6. Mutu produksi dan pelayanan wisata yang ada perlu ditingkatkan terutama akomodasi, penyajian obyek dan daya tarik wisata yang kurang direncanakan sehingga memberi kesan kurang menarik.
7. Fasilitas jalan untuk menuju obyek wisata khususnya ngebel sangat sempit dan berkelok-kelok padahal obyek wisata ini menjadi tujuan utama wisata hal ini yang menjadi kendala-kendala pengembangan sektor wisata dan menyebabkan penghambatnya pengembangan wisata.
8. Persaingan untuk mendapat pangsa pasar wisatawan mancanegara semakin tajam.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagian analisis dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1 .Kondisi potensi pariwisata di Kabupaten Ponorogo saat ini.

Obyek Wisata yang terdapat di Kabupaten Ponorogo secara umum memiliki potensi yang besar untuk menjadi Daerah Tujuan Wisata apabila dikembangkan dengan baik.

2. Potensi di Kabupaten Ponorogo yang telah didayagunakan.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melakukan upaya pemberdayaan potensi pariwisata guna meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. Diantaranya adalah dalam bidang kesenian tradisional Reog Ponorogo, pertunjukan Reog Ponorogo, Pentas Wayang Kulit, Grebeg Suro, dan lain-lain.

3 .Upaya pemberdayaan potensi pariwisata di Kabupaten Ponorogo dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

Kontribusi yang diberikan sektor wisata dan seni budaya kabupaten Ponorogo terhadap pendapatan asli Daerah setiap tahunnya meningkat. Namun dari sekian banyak obyek wisata dan seni budaya baru ada 4 obyek wisata yang dapat memberikan kontribusi dalam menunjang PAD

- a. Pemberdayaan Obyek dan Daya Tarik Wisata. Dengan cara membangun fasilitas-fasilitas pendukung wisata dan meningkatkan pemasaran souvenir-souvenir memperbaiki jalur Wisata.
- b. Pengembangan sarana dan Prasarana wisata dalam hal ini di masyarakat atau instansi terkait seperti PT Telkom, PLN, Pihak Kepolisian, Dinas Kesehatan, Pihak Hotel / Rumah Makan serta pihak lain yang terkait.
- c. Pengembangan pegawai. Mengadakan diklat teknis Pariwisata, mengikuti seminar-seminar dan kursus-kursus yang diadakan baik dalam maupun luar daerah.
- d. Pengembangan partisipasi masyarakat dan swasta. Melakukan bimbingan dan penerangan pada masyarakat agar lebih memahami arti wisata dan seni budaya dan membuka peluang pada pihak swasta untuk menanamkan modal pada pengembangan wisata dan seni budaya di kabupaten Ponorogo.
- e. Pengembangan Kesenian : Upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk wadah kesenian dan kebudayaan, mengadakan festival, upacara adat dan mengemas produk-produk kesenian dan kebudayaan menjadi lebih menarik.
- f. Pengembangan pemasaran dan Promosi wisata. Membuat leaflet, Bookflet, yang disebarakan keberbagai media, mengadakan promosi dan sebagainya.

4. Faktor pendukung dan penghambat upaya pemberdayaan potensi pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan Asli daerah di Kabupaten Ponorogo

Dalam hal upaya pemberdayaan potensi pariwisata ada beberapa hal yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan penghambat, yang termasuk faktor pendukung adalah letak geografis. Sedangkan faktor penghambat adalah adanya keterbatasan dana, kualitas, pengembangan yang rendah, fasilitas sarana prasarana dan pemasaran produk wisata yang masih berkurang.

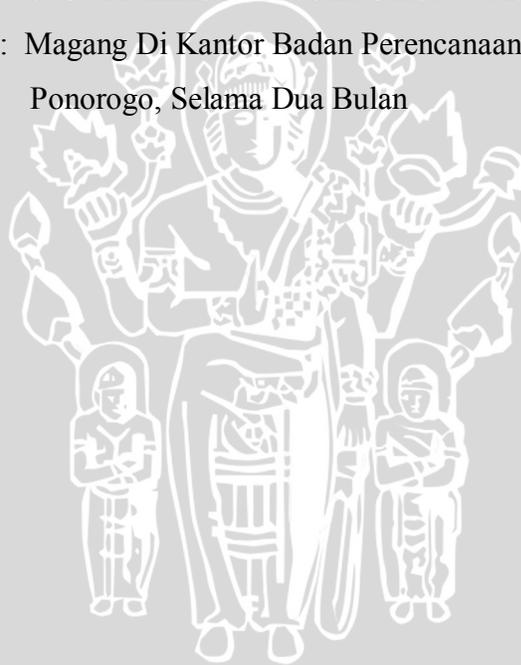
B. SARAN.

1. Upaya pemberdayaan potensi pariwisata Kabupaten Ponorogo perlu dilakukan lebih maksimal dan terencana dengan baik melalui peningkatan pelayanan wisata dan seni budaya dan penyediaan sarana prasarana yang memadai, peningkatan daya tarik wisata yang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan meningkat sehingga pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata juga meningkat dengan begitu kontribusinya diberikan terhadap PAD juga mengalami peningkatan.
2. Upaya untuk meningkatkan kualitas kesenian tradisional daerah dan daya tarik wisata lainnya dengan tetap menjaga nilai-nilai agama, adat istiadat, citra, harkat, dan martabat bangsa, upaya tersebut harus dapat mencegah hal-hal yang dapat merugikan kehidupan masyarakat dan kelestarian kehidupan budaya daerah.

3. Untuk dapat memberdayakan potensi pariwisata di kabupaten Ponorogo sehingga dapat menarik wisatawan, maka kiranya perlu sekali peningkatan sarana dan prasarana pada obyek wisata. Dengan demikian, wisatawan yang berkunjung akan lebih betah dan tertarik untuk dinikmati
4. Perlu dilakukan pengamanan yang lebih intensif dengan melakukan pemantauan secara terus menerus dan menyediakan petugas keamanan di setiap obyek wisata untuk menjamin keamanan dan keselamatan para wisatawan.
5. Diupayakan perbaikan jalan, karena jalan merupakan faktor utama dalam pengembangan wisata dan seni budaya.
6. Perlu adanya suatu kebijakan kepada desa / sekolah–sekolah untuk mengangkat kesenian tradisional yaitu REOG dengan menyarankan setiap desa harus punya minimal 1 group kesenian REOG dan menyarankan disetiap jalan ke desa diharapkan ada tulisan melambangkan REOG dan setiap sekolah harus menampilkan kesenian REOG

CURRICULUM VITAE

- Nama** : Enggar Setya Wardhani
- Nim** : 0410313043
- Tempat dan Tanggal Lahir** : Ponorogo, 22 Agustus 1985
- Alamat** : Tegalsari, Jetis, Ponorogo
- Pendidikan Formal** :
1. TK Busthanul Atfal Aisyiyah Ponorogo Lulus Tahun 1992
 2. SDN Wonoketro 1 Ponorogo Lulus Tahun 1998
 3. SLTP Negeri 1 Sambit Ponorogo Lulus Tahun 2001
 4. MAN 2 Ponorogo Lulus Tahun 2004
 5. S1 Administrasi Publik Unibraw Malang
- Pengalaman Kerja** : Magang Di Kantor Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Ponorogo, Selama Dua Bulan



repository.ub.ac

PERTANYAAN
(Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo)

1. Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Ponorogo.
2. Kontribusi sektor wisata dan seni budaya Kabupaten Ponorogo dalam empat tahun terakhir.
3. Kontribusi sektor wisata seni budaya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo dalam empat tahun terakhir.
4. Visi dan Misi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo.
5. Upaya dalam Pemberdayaan sarana dan prasarana wisata Kabupaten Ponorogo.
6. Industri yang mendukung sektor potensi wisata Kabupaten Ponorogo.
7. Permasalahan Pemberdayaan kemampuan pegawai Dinas Pariwisata dan Seni Budaya sebagai pelaksana dalam pengembangan wisata.
8. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pemberdayaan potensi wisata.
9. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pemasaran dan promosi wisata Kabupaten Ponorogo.
10. Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan obyek dan daya tarik wisata Kabupaten Ponorogo.
11. Berapa jumlah pegawai yang ada di Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo.
12. Apa setiap golongan di Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo itu mempunyai tugas yang berbeda – beda.
13. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pemberdayaan potensi wisata Kabupaten Ponorogo.

MOTTO

Takut akan kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak mencoba sesuatu

”Sesungguhnya disamping kesukaran ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai, (mengerjakan suatu pekerjaan), maka bersusah payahlah (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berhadaplah”

(QS. Al Insyirah : 6-8)



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Curriculum Vitae

Lampiran 2. Peta Wisata Kabupaten Ponorogo

Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo

Lampiran 4. Surat keterangan telah melakukan riset / survey

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2006.....	60
Tabel 2. Potensi Wisata Alam di Kabupaten Ponorogo.....	80
Tabel 3. Potensi Wisata Budaya Kabupaten Ponorogo.....	81
Tabel 4. Potensi Wisata Religius Kabupaten Ponorogo.....	81
Tabel 5. Potensi Wisata Buatan Kabupaten Ponorogo.....	82
Tabel 6. Pembangunan fasilitas primer pada obyek wisata dan seni budaya Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 / 2006.....	82
Tabel 7. Pendapatan Daerah dari sektor wisata dan seni budaya Kabupaten Ponorogo Tahun 2003 / 2006.....	94
Tabel 8. Kontribusi Sektor Wisata dan Seni Budaya Terhadap PAD.....	95
Tabel 9. Sarana Hotel dan Penginapan Kabupaten Ponorogo.....	105
Tabel 10. Data Rumah Makan dan Restoran Kabupaten Ponorogo.....	106
Tabel 11. Data Transportasi Perjalanan Wisata Kabupaten Ponorogo.....	108
Tabel 12. Prasarana Kesehatan di Kabupaten Ponorogo.....	110
Tabel 13. Data Paguyuban Reog Ponorogo.....	120